



PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN
GROBOGAN**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat



mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kabupaten Grobogan, 5 Februari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN GROBOGAN



dr. SLAMET WIDODO, MAP

NIP. 19640627 198910 1 001

Pembina Utama Muda



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	35
D. Landasan Hukum	37
E. Sistematika	38
BAB II PERENCANAAN KINERJA	39
A. Rencana Strategis	39
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	51
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	80
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	102
A. Capaian Kinerja Organisasi	105
B. Realisasi Anggaran	224
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	233
BAB IV PENUTUP	243
LAMPIRAN	246
SK TIM DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN	247
MATRIKS RENSTRA	253
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	278
PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. GROBOGAN	282

BAB I PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate



sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Eselon II, Eselon III, Unit Pelaksana Teknik Dinas dan Fungsional tertentu di Dinas Kesehatan.

1. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok

Kepala dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan, merumuskan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bidang kesehatan dan memberikan



bimbingan, pembinaan dan pengawasan, pengelolaan administrasi dan program Dinas, UPTD serta pembinaan dan pengawasan Jabatan Fungsional

b. Fungsi:

Kepala dinas dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b) Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan;
- c) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesehatan;
- d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan;
- e) Pengelolaan kesekretariatan dinas;
- f) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas:

Kepala dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan:

- a) Merumuskan konsep kebijakan teknis di bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
- b) Merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;



- d) Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
- e) Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- f) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g) Menetapkan kebijakan dan standar operasional di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang didelegasikan;
- h) Menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- i) Merumuskan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- j) Melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- k) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- l) Menyelenggarakan pembinaan fungsional terhadap unit-unit organisasi di lingkup Dinas;



- m) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
- n) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- o) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- p) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
- q) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

a. Tugas Pokok:

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat- menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

b. Fungsi:

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;



- b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan suratmenyurat;
- d) Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
- e) Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
- f) Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Uraian Tugas:

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan:

- a) Menyusun program kegiatan sekretariat pada dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundangundangan;
- b) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, kebudayaan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, administrasiumum, administrasi



- kepegawaian, administrasi keuangan, serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
 - g) Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Budaya Kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta fasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - h) Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - i) Mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
 - j) Menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, suratmenyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
 - k) Melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - l) Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di Subbagian Perencanaan, Subbagian Umum, dan Subbagian Keuangan sebagai bahan evaluasi;



- m) Mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang kesehatan;
- n) Mengoordinasikan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang kesehatan;
- o) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- p) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- r) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas Pokok:

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat.

b. Fungsi:

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat;
- b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat;
- c) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang kesehatan masyarakat;



- d) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan masyarakat;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas:

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan:

- a) Menyusun rencana dan program kegiatan bidang kesehatan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f) Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan olah raga;
- g) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan olah raga;



- h) Menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan olah raga;
- i) Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan olah raga;
- j) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturanperundang-undangan;
- k) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi pengambilan kebijakan berikutnya;
- l) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas Pokok:

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

b. Fungsi:

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:



- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - c) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - d) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Uraian Tugas:

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan:

- a) Menyusun rencana dan program kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;



- e) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f) Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, dan tanggap darurat bencana dan pemantauannya;
- g) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, dan tanggap darurat bencana dan pemantauannya;
- h) Menyiapkan bahan dan merancang perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi,
- i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, dan tanggap darurat bencana dan pemantauannya;
- j) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- k) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- l) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Penunjang

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Penunjang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas.

a. Tugas Pokok:



Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Penunjang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang.

b. Fungsi:

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Penunjang dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang;
- b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang;
- c) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang;
- d) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas:

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan:

- a) Menyusun rencana dan program kegiatan bidang pelayanan kesehatan dan penunjang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- b) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f) Menyiapkan bahan dan merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk pelayanan kesehatan penunjang dan mutu pelayanannya;
- g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk pelayanan kesehatan penunjang dan mutu pelayanannya;
- h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk pelayanan kesehatan penunjang dan mutu pelayanannya;
- i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk pelayanan kesehatan penunjang dan mutu pelayanannya;
- j) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;



- l) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas Pokok:

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang sumber daya kesehatan

b. Fungsi:

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya kesehatan;
- b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya kesehatan;
- c) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang sumber daya kesehatan;
- d) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang sumber daya kesehatan;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sumber daya kesehatan; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas:



Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan:

- a) Menyusun rencana dan program kegiatan bidang sumber daya kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f) Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang pembiayaan kesehatan, sertifikasi, perizinan dan akreditasi, dan sumber daya manusia kesehatan;
- g) Menyiapkan bahan dan merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sumber daya kesehatan;
- h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pembiayaan kesehatan, sertifikasi, perizinan dan akreditasi, dan sumber daya manusia kesehatan;
- i) Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan kesehatan, sertifikasi, izin/rekomendasi perizinan dan akreditasi, serta sumber daya manusia kesehatan;
- j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pembiayaan kesehatan, sertifikasi, izin/rekomendasi perizinan dan akreditasi, serta sumber daya manusia kesehatan;



- k) Melaksanakan monitoring, gevaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- l) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- m) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

a. UPTD Puskesmas

UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a) Tugas Pokok:

Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang UPTD, penyusunan rencana kegiatan UPTD, melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis bidang puskesmas.

b) Fungsi:

UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja di bidang kesehatan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan program pembangunan berwawasan kesehatan;
- 4) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pelayanan kesehatan strata pertama; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Uraian Tugas Jabatan:

Uraian tugas jabatan Kepala UPTD Puskesmas terdiri dari:



- 1) Menyusun program kerja UPTD Puskesmas berdasarkan program kerja dinas serta hasil evaluasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas;
- 3) Mengembangkan kemampuan teknis dan operasional;
- 4) Menyusun konsep pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta membina dan mengembangkan peran serta masyarakat di wilayah kerjanya;
- 5) Menyelenggarakan pelayanan upaya kesehatan wajib yang terdiri dari Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak serta KB, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Pengobatan;
- 6) Menyelenggarakan pelayanan upaya kesehatan pengembangan yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada di puskesmas dengan kemampuan puskesmas yang meliputi Kesehatan Sekolah, Kesehatan Olah Raga, Perawatan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Kerja, Kesehatan Gigi dan Mulut, Kesehatan Jiwa, Kesehatan Mata, Kesehatan Usia Lanjut, Pembinaan Pengobatan Tradisional dan Rehabilitasi Medik serta kesehatan haji;
- 7) Menyelenggarakan pelayanan penunjang pemeriksaan sesuai dengan kemampuan puskesmas antara lain laboratorium medis, laboratorium kesehatan masyarakat, radiologi, Ultrasonografi (USG), Elektrokardiogram (ECG), dan lain sebagainya;
- 8) Memberikan petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya agar pekerjaan berjalan lancar;
- 9) Melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan UPTD Puskesmas, penyusunan data dan pelaporan;



- 10) Menyusun rencana kegiatan operasional program Puskesmas dalam bentuk Plan Of Action (POA) yang dibuat satu tahun sekali dalam rangka manajemen Puskesmas;
- 11) Mengembangkan partisipasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- 12) Mewujudkan dan membina upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- 13) Memberikan masukan kepada pengambil keputusan tingkat kecamatan perlunya melakukan pembangunan yang mempertimbangkan aspek kesehatan;
- 14) Melaksanakan pertemuan staf secara berkala dalam rangka membahas ketersediaan sumber daya, masalahmasalah program kesehatan guna mencari pemecahannya;
- 15) Memberikan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan;
- 16) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 17) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan untuk melaksanakan tugas; dan
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

b. UPTD Gudang Farmasi

UPTD Gudang Farmasi dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a) Tugas Pokok:

Kepala UPTD Gudang Farmasi mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas di UPTD Gudang Farmasi dan menyelenggarakan kegiatan kefarmasian.



b) Fungsi:

UPTD Gudang Farmasi mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja di bidang kesehatan dan kefarmasian;
- 2) Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kefarmasian;
- 3) Pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan lainnya ke UPTD Puskesmas; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Uraian Tugas Jabatan:

Uraian tugas jabatan Kepala UPTD Gudang Farmasi terdiri dari:

- 1) Menyusun program kerja UPTD Gudang Farmasi;
- 2) Menyusun rencana kerja berdasarkan program kerja dinas serta evaluasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- 3) Melaksanakan kegiatan yang meliputi: menerima, menyimpan, dan mendistribusikan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
- 4) Melakukan pengecekan dan pemeliharaan obat dan sarana pada Gudang Farmasi yang berkaitan dengan obat-obatan agar obat-obatan tidak rusak dan kadaluarsa;
- 5) Menghentikan distribusi obat kadaluarsa, rusak dan melakukan pemusnahan obat yang berkaitan dengan obat-obatan agar obat-obatan tidak rusak dan kadaluarsa;
- 6) Menghentikan distribusi obat kadaluarsa, rusak dan melakukan pemusnahan obat sesuai usulan UPTD Puskesmas;
- 7) Melakukan kegiatan administrasi obat-obatan guna mengetahui jumlah obat yang masuk dan keluar;



- 8) Mengatur pengelolaan obat di Gudang Farmasi dengan penempatan yang baik dengan sistem First In First Out (FIFO)/First Expire First Out (FEFO);
- 9) Melaksanakan pengawasan mutu obat sehingga obat aman dipakai;
- 10) Melakukan pengendalian dan pengawasan obat di UPTD Puskesmas dan jaringannya;
- 11) Melaksanakan pelaporan persediaan dan pemakaian obat di UPTD Gudang Farmasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- 12) Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
- 13) Memberikan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan; dan
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat

UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a) Tugas Pokok:

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.

b) Fungsi:

UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja di bidang kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan laboratorium yang meliputi:
- 3) Laboratorium Air, Laboratorium Klinis dan Laboratorium Kesehatan lainnya; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Uraian Tugas Jabatan:



Uraian tugas jabatan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

- 1) Menyusun program kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - 2) Menyusun rencana kegiatan operasional pelayanan laboratorium kesehatan berdasarkan program kerja serta hasil evaluasi;
 - 3) Memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium air, laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lainnya;
 - 4) Melaksanakan sosialisasi program laboratorium kesehatan masyarakat bekerjasama dengan instansi terkait;
 - 5) Melakukan koordinasi dengan instansi/unit terkait untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan Laboratorium kesehatan;
 - 6) Melaksanakan pelaporan rutin dan insidental program-program laboratorium kesehatan masyarakat yang menjadi tugasnya;
 - 7) Mengendalikan tugas bawahan dalam pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - 8) Memberikan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan;
 - 9) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 44 ayat (7), dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tata hubungan, dan pengelolaan keuangan rumah sakit daerah diatur dalam Peraturan Presiden. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 121, dinyatakan bahwa penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2



(dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah tersebut berlaku. Selain itu, pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyatakan bahwa UPTD Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Namun demikian, sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor 188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 Hal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah pada angka 3 dinyatakan bahwa rumah sakit dapat menggunakan struktur kelembagaan yang ada saat ini sampai ditetapkan Peraturan Presiden tentang kelembagaan rumah sakit daerah. UOBK Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dipimpin oleh Direktur UOBK RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a) Tugas Pokok:

Direktur UOBK RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi mempunyai tugas pokok Direktur mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

b) Fungsi:

UOBK RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
- 2) Pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, urusan umum dan kepegawaian RSUD;



- 3) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - 4) Penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - 5) Penyelenggaraan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
 - 6) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup RSUD; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
- c) Uraian Tugas Jabatan:

Uraian tugas jabatan Direktur UOBK RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan terdiri dari:

- 1) Menyusun rencana kerja RSUD berdasarkan program kerja dan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- 2) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
- 3) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup RSUD;
- 4) Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan RSUD;
- 5) Melaksanakan operasional RSUD;
- 6) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- 7) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- 8) Menetapkan pedoman kerja dan Standar Operasional Prosedur di lingkup RSUD;
- 9) Melaksanakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan pada RSUD;



- 10) Mengelola manajemen keuangan dan sumber daya RSUD;
 - 11) Mengoordinasikan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawab unit kerjanya;
 - 12) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah/instansi terkait untuk kepentingan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD;
 - 13) Menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik Daerah serta urusan umum di lingkup RSUD;
 - 14) Menyusun Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bupati sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi serta menetapkan indikator kinerja kegiatan RSUD;
 - 15) Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan RSUD;
 - 16) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
 - 17) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - 18) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- d) Susunan Organisasi UOBK RSUD
- Susunan organisasi UOBK RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:



1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - c) Subbagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 2. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - a) Subbagian Anggaran dan Mobilisasi Dana;
 - b) Subbagian Perbendaharaan; dan
 - c) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
 3. Bagian Bina Program, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan Program dan Pengembangan Rumah Sakit;
 - b) Subbagian Kerjasama, Promosi dan Hubungan Masyarakat; dan
 - c) Subbagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Pelaporan.
- c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
1. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan, Gawat Darurat dan Sumber Daya Manusia; dan
 - b) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap dan Sarana Prasarana Medik.
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahkan:
 - a) Seksi Sumber Daya Pelayanan Keperawatan; dan
 - b) Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan
 3. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan Penunjang Medik ; dan
 - b) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 5. Unit Organisasi Pendukung
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- 1) RSUD dapat membentuk Kelompok Jabatan fungsional.



- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 6) Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bagian dan/atau Kepala Bidang dan/atau Kepala Subbagian dan/atau Kepala Seksi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Ki Ageng Selo Wirosari dan RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, uraian jabatan dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah dinas rumah sakit umum daerah kelas D Ki Ageng Selo Wirosari dan unit pelaksana teknis daerah rumah sakit umum daerah kelas D Ki Ageng Getas Pendowo Gubug.

UOBK Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas D Ki Ageng Selo Wirosari dan Ki Ageng Getas Pendowo Gubug dipimpin oleh Direktur UOBK RSUD kelas D Ki Ageng Selo Wirosari dan Ki Ageng Getas Pendowo Gubug yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a) Tugas Pokok:

Direktur UOBK RSUD kelas D Ki Ageng Selo Wirosari dan Ki Ageng Getas Pendowo Gubug mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya



manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

b) Fungsi:

UOBK RSUD kelas D Ki Ageng Selo Wirosari dan Ki Ageng Getas Pendowo Gubug Kabupaten Grobogan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
- 2) Pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, urusan umum dan kepegawaian RSUD;
- 3) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD dengan peraturan perundangundangan;
- 4) Penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- 5) Penyelenggaraan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- 6) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup RSUD; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

c) Uraian Tugas Jabatan:

Uraian tugas jabatan Direktur UOBK RSUD kelas D Ki Ageng Selo Wirosari dan Ki Ageng Getas Pendowo Gubug Kabupaten Grobogan terdiri dari:

- 1) Menyusun rencana kerja RSUD berdasarkan program kerja dan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- 2) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
- 3) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup RSUD;
- 4) Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan RSUD;



- 5) Melaksanakan operasional RSUD;
- 6) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- 7) Menetapkan pedoman kerja dan Standar Operasional Prosedur di lingkup RSUD;
- 8) Melaksanakan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan pada RSUD;
- 9) Mengelola manajemen keuangan dan sumber daya RSUD;
- 10) Mengoordinasikan pemungutan pendapatan asli Daerah yang menjadi tanggung jawab unit kerjanya;
- 11) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat Daerah/ instansi terkait untuk kepentingan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD;
- 12) Menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik Daerah serta urusan umum di lingkup RSUD;
- 13) Menyusun Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bupati sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi serta menetapkan indikator kinerja kegiatan RSUD;
- 14) Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan RSUD;
- 15) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- 16) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan, baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 17) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup RSUD;



- 18) Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan RSUD;
- 19) Melaksanakan operasional RSUD;
- 20) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- 21) Menetapkan pedoman kerja dan Standar Operasional Prosedur di lingkup RSUD;
- 22) Melaksanakan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan pada RSUD;
- 23) Mengelola manajemen keuangan dan sumber daya RSUD;
- 24) Mengoordinasikan pemungutan pendapatan asli Daerah yang menjadi tanggung jawab unit kerjanya;
- 25) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat Daerah/ instansi terkait untuk kepentingan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD;
- 26) Menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik Daerah serta urusan umum di lingkup RSUD;
- 27) Menyusun Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bupati sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi serta menetapkan indikator kinerja kegiatan RSUD;
- 28) Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan RSUD;
- 29) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- 30) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan, baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 31) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal;



32) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

d) Susunan Organisasi UOBK RSUD

Susunan organisasi UOBK RSUD kelas D Ki Ageng Selo Wirosari dan Ki Ageng Getas Pendowo Gubug terdiri dari:

- 1) Direktur;
- 2) Subbagian Tata Usaha;
- 3) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- 4) Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Unit Organisasi Pendukung

e) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSUD mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu sebagian tugas Direktur dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. . Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu



- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangb. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi dalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Jumlah jabatan fungsional tertentu ditentukanberdasarkanperumpunan, sifat dan jenis sesuai beban kerja,yang penetapan formasinya diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pembinaan terhadap jabatan fungsional tertentu dilakukan oleh Instansi pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan terdiri

- a. Kepala Dinas,
Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum.
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - a) Sub Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b) Sub Koordinator Promosi Kesehatan; dan
 - c) Sub Koordinator Gizi, Remaja dan Usia Lanjut.
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 - a) Sub Koordinator Surveilans, Imunisasi dan Kejadian Luar Biasa;



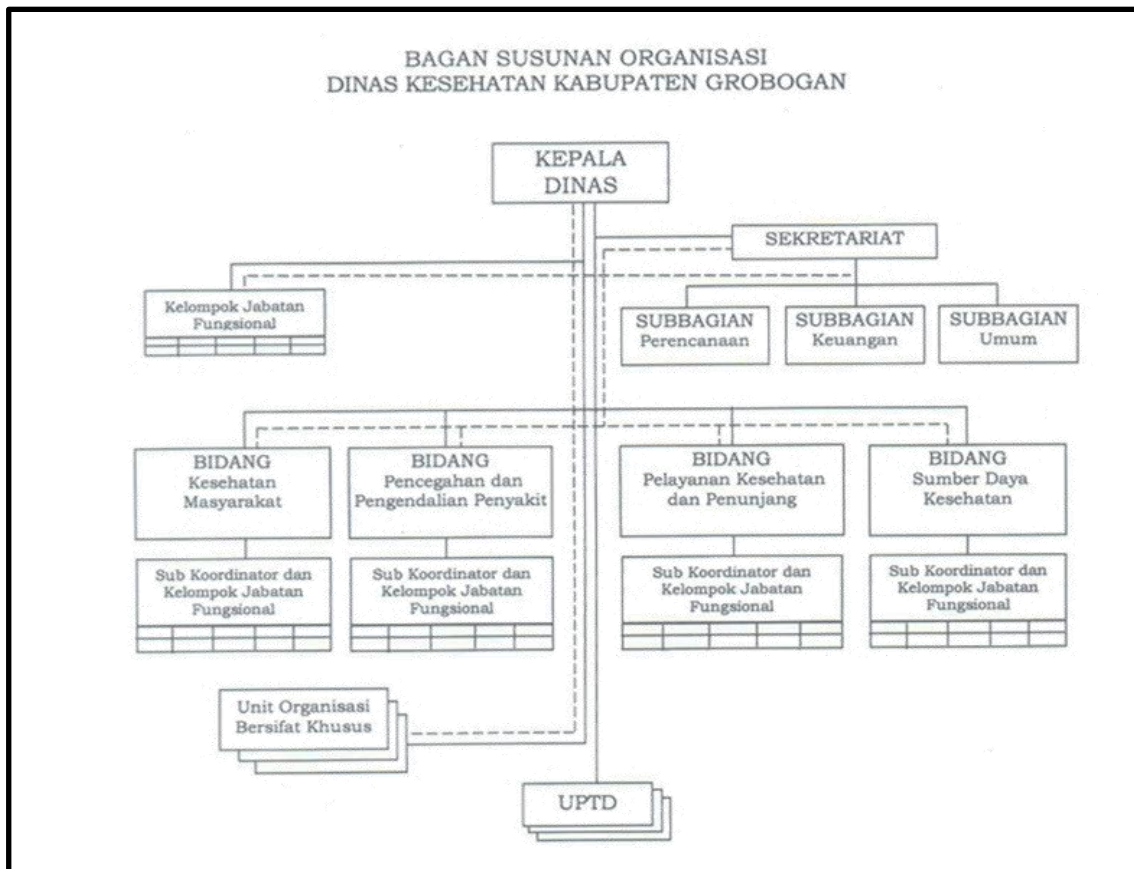
- b) Sub Koordinator Penanggulangan Penyakit Menular; dan
- c) Sub Koordinator Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Penunjang, membawahkan:
 - a) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - b) Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan; dan
 - c) Sub Koordinator Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan.
- e. Bidang Sumberdaya Kesehatan, membawahkan:
 - a) Sub Koordinator Pembiayaan Kesehatan;
 - b) Sub Koordinator Sertifikasi, Perizinan dan Akreditasi;
 - c) Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan;
- e. pengelolaan kesekretariatan Dinas;
- f. pengelolaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan .

Gambar 1.1.



Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.



Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka kematian Ibu dan angka kematian bayi; Angka kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Grobogan terjadi penurunan dari 12,94 per 1.000 KH pada tahun 2022 menjadi 12,67 per 1.000 KH pada tahun 2023. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Grobogan mengalami kenaikan yaitu sebesar 182,28 per100.000 KH pada tahun 2023 dan 120,05 per 100.000 KH pada tahun 2022
2. Masih kurangnya mutu pelayanan baik sarana, prasarana maupun sumber daya kesehatan;
3. Sarana dan prasarana kesehatan baik rujukan, maupun dasar secara kuantitas telah mencukupi namun secara kualitas belum optimal;
4. Masih ditemukannya gizi buruk pada anak usia bawah lima tahun atau kategori tertentu. Capaian Prevalensi gizi buruk tahun 2022 sebesar 0,03 dan meningkat menjadi 0,07 di taun 2023.
5. Masih kurangnya mutu pelayanan baik sarana, prasarana maupun sumber daya kesehatan.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan hal ini dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABa), belum optimalnya pencapaian Keluarga Sehat, masih tingginya penyakit menular dan tidak menular terutama



- pandemic Covid-19 dan kualitas fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, belum tercapainya SPM di bidang kesehatan;
2. Belum optimalnya tata kelola majaemen dalam pelaksanaan good governance;

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah Kabupaten Grobogan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



8. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2016;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;
12. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 050/17/2023 tentang Persetujuan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.

D. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dan stakeholder.



Selanjutnya, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

- **Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan
Berbudaya”**

- **Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Misi 2 : Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana

Misi 3 : Memperkuat Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi 4 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Misi 5 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat



Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing “

- **Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebanyak 2 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	74,92	75,02	75,14	75,22	75,3
		1. Meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita	1. Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230,29	182,28	160,80	146,74	137,36
			2. Angka Kematian Bayi	13,03	12,67	12,54	12,29	12,04
			3. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14,5	14,3	14	14	14
		2. Meningkatkan kualitas fasilitas	Persentase rumah sakit rujukan	60	65	65	65	65



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		kesehatan rujukan	terakreditasi					
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik DAN Pelayanan Publik yang berkualitas		1. Nilai SAKIP	70,20	70,23	70,25	72	73,5
			2. Nilai IKM	76,70	77,20	77,70	78,20	79,70
		Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di dukung dengan manajemen	1. Nilai SAKIP	70,20	70,23	70,25	72	73,5



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		administrasi perkantoran pemerintahan yang baik						
			2. Nilai IKM	76,70	77,20	77,70	78,20	79,70

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan periode 2021-2026

1. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1.1. Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 / tahun	Kematian ibu adalah kasus kematian seorang perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan kehamilan (termasuk hamil ektopik) persalinan, abotus (termasuk abotus, Mola) dan masa	Jumlah kematian ibu di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama x 100.000	BPS



					dalam kurun waktu 42 hari Setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian incidental .		
		1.2	Angka Kematian Bayi	per 1.000	Kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai belum berusia tepat 1 tahun di suatu wilayah	Jumlah kematian bayi di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah Kelahiran Hidup pada periode waktu yang sama x 1.000	Kemenkes



					kerja pada kurun waktu tertentu.		
		1.3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	Anak umur 0 sampai 5 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan Indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Zscore kurang dari -2 SD (Standart Deviasi)	Jumlah Balita Pendek / Jumlah Balita yang diukur panjang/tinggi badan x 100	Kemenkes
2	Meningkatkan kualitas	2.1	Persentase	%	· Akreditasi	Jumlah RS Rujukan yang	Kemenkes



	fasilitas kesehatan rujukan		rumah sakit rujukan terakreditasi	<p>RS adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan RS setelah dilakukan penilaian bahwa RS telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Akreditasi Yang dibutuhkan minimal utama.▪ Cakupan Perhitungan rumah sakit negeri dan swasta.▪ Dibuktikan Dengan dokumen	terakreditasi / Jumlah RS di kabupaten/kota x 100 %	
--	-----------------------------	--	-----------------------------------	--	---	--



					Pendukung terkait.		
3	Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik,	3.1	Nilai SAKIP	Indeks Skor	Nilai SAKIP Adalah hasil aktivitas analisis Yang sistematis, Pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah	Hasil evaluasi Inspektorat	Inspektorat
		3.2	Nilai IKM	Indeks	Nilai IKM adalah	Hasil Survei Kepuasan	Penilaian



				Skor	hasil penilaian masyarakat yang mendapatkan layanan di perangkat daerah dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan oleh KemenPAN-RB	Masyarakat sesuai Pemen PNRB No. 14 Tahun 2017	mandiri
--	--	--	--	------	--	--	---------

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2023



B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2023
Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	75,02
		1.1 Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000	230,29
			Angka Kematian Bayi	per 1.000	13,03
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	%	14,5



				pada balita		
				Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk	%	0,087
				Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan UKP dan UKM yang tersedia	unit	74
				Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit	0
				Jumlah pengembangan rumah sakit (RSUD dr R Soedjati)	paket	1
				Jumlah pengembangan rumah sakit (RSUD Ki Ageng Selo)	paket	3
				Jumlah pengembangan rumah sakit (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	paket	2



				Jumlah Puskesmas yang dilakukan pengembangan	Puskesmas	2
				Jumlah Fasilitas Kesehatan lain yang dilakukan pengembangan	Fasilitas Kesehatan	0
				Jumlah Fasyankes yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	Fasilitas Kesehatan	1
				Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	Rumah Dinas	1
				Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	paket	2
				Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan (RSUD	paket	1



				dr R Soedjati)		
				Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Selo)	paket	1
				Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	paket	0
				Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik pelayanan kesehatan	paket	10
				Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik pelayanan kesehatan (RSUD dr R Soedjati)	paket	1
				Jumlah paket	paket	2



				pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Selo)		
				Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	paket	2
				Jenis obat yang disediakan	jenis	70
				Jenis obat yang disediakan (RSUD Ki Ageng Selo)	jenis	5
				Jenis obat yang disediakan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	jenis	70
				Jenis bahan habis pakai yang di sediakan (RSUD dr R Soedjati)	jenis	25
				Jenis bahan habis	jenis	5



				pakai yang di sediakan (RSUD Ki Ageng Selo)		
				Jenis bahan habis pakai yang di sediakan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	jenis	50
				Jumlah distribusi obat, vaksin dan BMHP ke puskesmas	kali	360
				Presentase capaian hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	%	100
				Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	%	5
				Presentase jenis layanan kesehatan UKM dan UKP yang diberikan	%	74
				Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai	orang	22041



				standar		
				Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan Pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	orang	21317
				Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	orang	21250
				Jumlah balita (12 - 59 bulan) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	88733
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada	orang	203.380



				di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran		
				Jumlah orang usia 15 - 59 tahun di Kabupaten yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	orang	963.408
				Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.	orang	192.215
				Jumlah penderita Hipertensi usia \geq 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	orang	440.930



				standar dalam kurun waktu setahun		
				Jumlah penderita Diabetes Melitus \geq 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu setahun	orang	20.390
				Jml ODGJ berat didlm wilayah kerja Kab yg mendapatkan	orang	2.445
				Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	orang	11.561
				Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan	orang	33.057



				pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun		
				Jumlah kejadian KLB yang ditangani	kali	15
				Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pasca bencana	Unit	70
				Jumlah bayi dan balita yang ditimbang	orang	112.950
				Jumlah ibu nifas yang didampingi IMD (Inisiasi Menyusu Dini)	orang	1.481
				Jumlah bayi umur 6 bl dapat ASI Eksklusif	orang	2.160
				Jumlah pasar yang diawasi dalam penggunaan garam beryodium	unit	18



			Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan kesehatan Olahraga	unit	30
			Jumlah Desa STBM di Wilayah Kab. Grobogan	desa	115
			Jumlah Puskesmas dan RS yang melakukan pengelolaan limbah Fasyankes	unit	38
			Jumlah media promosi kesehatan yang digunakan	Jenis	4
			Jumlah keluarga yang mendapatkan edukasi keluarga sehat	KK	250.000
			Jumlah puskesmas yang dibina dalam Pelayanan tradisional	unit	30
			Jumlah bayi dan	orang	33.750



				balita yang diimunisasi		
				Jumlah anak sekolah yang diimunisasi	orang	59.300
				Jumlah Pelacakan Epidelmiologis KLB PD3I, Penyakit Menular dan Keracunan Makanan	kasus	200
				Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	961.002
				Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	orang	2443
				Jumlah Calon Jamaah Haji yang mendapatkan Pembinaan Kesehatan	orang	1190



			Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan kesehatan	orang	140
			Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pasca krisis kesehatan	Unit	70
			Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada Pasien Covid-19	Unit	70
			Jumlah penderita penyakit malaria yang dilayani	Unit	17
			Jumlah penderita penyakit leptospirosis yang dilayani	orang	13
			Jumlah penderita	orang	4



				penyakit Filariasis yang dilayani		
				Jumlah penderita covid 19	orang	1000
				Jumlah masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	orang	53.500
				Jumlah Deteksi dini penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan Sekolah	unit	45
				Jumlah pengiriman specimen Penyakit Potensial KLB ke laboratorium rujukan atau laboratorium nasional	kali	147
				Jumlah kecamatan yang dibina kab sehat	Kec	13
				Jumlah fasilitas pelayanan	unit	39



				kesehatan yang melakukan Telemedicine		
				Jumlah pekerjaan preventif dan promotif yang dilaksanakan	pekerjaan	8
				Jumlah puskesmas Terakreditasi utama	puskesmas	24
				Jumlah rumah sakit umum daerah tipe D Terakreditasi	unit	2
				Jumlah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang tertangani	kasus	20
				Menurunnya Kasus DBD	kasus	380
				Jumlah kasus kegawatdaruratan medis yang ditangani	kasus	280
				Jumlah kasus Covid-19 yang dievakuasi	kasus	140
				Jumlah data dan	jenis	6



				informasi kesehatan yang dikelola		
				Jumlah data dan informasi kesehatan yang dikelola	jenis	6
				Jumlah aplikasi yang dikelola	aplikasi	4
				Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Unit	39
				Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan	Unit	70
				Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikanpelaya	Unit	70



				nan kesehatan sesuai standar		
				Tersedianya Sistem Rujukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	39
				Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	83,3
				Presentase Tenaga Kesehatan yang mempunyai Izin	%	90
				Jumlah Tenaga Kesehatan yang mempunyai izin	orang	650
				Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	orang	75
				Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang	%	55,25



				sesuai kebutuhan		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	dokum en	4
				Jumlah dokumen Perencanaan tenaga kesehatan	dokum en	4
				Presentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	27
				Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	orang	165
				Jumlah Petugas Laborat Puskesmas yang dibina	Orang	34
				Presentas fasilitas Pelayanan kefarmasian (apotek dan Toko	%	66



				Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan		
				Presentase apotek, Toko obat, Toko Alat kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin	%	73
				Jumlah sarana farmasi yang diawasi	lokasi	156
				Jumlah dokumen Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dokumen	1
				Presentase industri rumah tangga yang mempunyai izin	%	63
				Jumlah Penerbitan	Sarana	82



				Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga		
				Jumlah PIRT yang memiliki SPPRT dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Tindak Lanjut	Sarana	33
				Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	%	70



				Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Buah	44
				Jumlah TPM yang diperiksa	unit	40
				Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Buah	90
				Jumlah TPM yang distikerisasi	unit	90
				Jumlah industri rumah tangga yang diperiksa dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan	Unit	32



				Minuman Industri Rumah Tangga		
				Jumlah PIRT yang diperiksa post market	unit	79
				Jumlah pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman (Sampling dan pengujian pangan industri rumah tangga)	kali	14
				Jumlah dokumen perizinan industri rumah tangga	dokum en	1
				Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	desa	38
				Jumlah kelompok sasaran advokasi dan kemitraan	Unit	53
				Jumlah advokasi yang dilaksanakan	kali	7
				Jumlah kemitraan yang dilaksanakan	kali	8
				Jumlah Desa/	desa	38



				kelurahan yang dibina Desa Siaga		
				Jumlah kelompok sasaran promosi	unit	58.000
				Jumlah kelompok sasaran promosi	unit	58.000
				Jumlah UKBM yang dibina	Unit	1006
				Jumlah UKBM yang dibina	Unit	1006
		1.2	Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan rujukan	Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi	%	60
2	Meningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	2.1	Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran	Nilai SAKIP	Indeks Skor	70,20



	pemerintahan yang baik			
		Nilai IKM	Indeks skor	76,70
		Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100
		Cakupan Pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100
		Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Tahunan yang Disusun Sesuai Pedoman yang Berlaku	%	100



		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan yang Disusun Tepat Waktu	dokumen	2
		Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Urusan Kesehatan yang disusun	dokumen	1
		Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	%	100
		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang	1.400
		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang	463
		Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	%	100
		Jumlah kegiatan penatausahaan	Jenis	1



		BMD SKPD		
		Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya	%	100
		Jumlah pengadaan pakaian dan atribut	buah	120
		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	orang	12
		Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	%	100
		Jumlah persediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	15
		Jumlah persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	6
		Jumlah persediaan	jenis	40



		Peralatan rumah tangga		
		Jumlah persediaan Bahan logistik kantor	jenis	7
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	jenis	11
		Jumlah jenis bahan bacaan dan koran	jenis	2
		Jumlah persediaan ATK	jenis	60
		Jumlah perjalanan dinas keluar dan dalam daerah	kali	450
		Persentase barang milik daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	%	100
		Jumlah jenis Pengadaan mebeler	jenis	2
		Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung kantor yang diadakan	jenis	7



		Persentase jasa penunjang yang tersedia sesuai kebutuhan	%	100
		Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia setiap bulan	buah	750
		Jumlah rekening langganan komunikasi, langganan air dan langganan listrik	rekening	144
		Jumlah tenaga non PNS yang dibayar	orang	9.936
		Jumlah tenaga non PNS yang dibayar	orang	252
		Jumlah tenaga non PNS yang dibayar	orang	840
		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	%	100
		Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	jenis	4
		Jumlah	paket	5



		Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya yang terlaksana		
		Jenis Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terlaksana	jenis	4
		Persentase pekerjaan BLUD puskesmas yang terlaksana	%	100
		Jumlah pekerjaan BLUD Puskesmas yang dilaksanakan	pekerjaan	40
		Jumlah pekerjaan BLUD RSUD KI Ageng Selo yang dilaksanakan	unit kerja	58
		Jumlah pekerjaan BLUD RSUD KI Ageng Getas Pendowo yang	pekerjaan	45



		dilaksanakan		
		Jumlah pekerjaan BLUD RSUD dr R Soedjati yang dilaksanakan	pekerjaan	44

Sumber : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 15 bulan Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita	1	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000	182,28
		2	Angka Kematian Bayi	per 1000	12,67
		3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	14,3
2	Meningkatkan kualitas kesehatan rujukan	1	Persentase Rumah Sakit rujukan terakreditasi	%	65
3	Meningkatkan tat kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang berkualitas	1	Nilai SAKIP	Indeks Skor	70,23
		2	Nilai IKM	Indeks Skor	77,20
4	Meningkatkan tat kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan public di dukung dengan manajemen administrasi perkantoran	1	Nilai SAKIP	Indeks Skor	70,23



	pemerintahan yang baik				
		2	Nilai IKM	Indeks Skor	77,20

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan :



Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	100	420.520.089.538
		Cakupan Pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	100	
		Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	100	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	1	222.890.300



		Tahunan yang Disusun Sesuai Pedoman yang Berlaku		
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan yang Disusun Tepat Waktu	2	192.890.300
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Urusan Kesehatan yang disusun	1	30.000.000
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	100	147.134.867.000
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	1.400	147.134.867.000
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya	100	35.022.500



11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	12	35.022.500
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100	2.429.208.550
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah persediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15	45.000.000
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6	270.103.350
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah persediaan Peralatan rumah tangga	40	65.000.000
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah persediaan Bahan logistik kantor	7	705.679.700



18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinkes)	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	11	113.000.000
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan (Dinkes)	Jumlah jenis bahan bacaan dan koran	2	12.600.000
20	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah persediaan ATK	60	100.000.000
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinkes)	jumlah perjalanan dinas keluar dan dalam daerah	450	1.117.825.500
25	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia sesuai kebutuhan	100	907.385.000
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinkes)	jumlah jasa surat menyurat yang tersedia setiap bulan	750	6.500.000
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinkes)	Jumlah rekening langganan komunikasi, langganan air dan langganan listrik	144	600.000.000



28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinkes)	Jumlah tenaga non PNS yang dibayar	9.936	300.885.000
31	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	609.372.000
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	4	100.000.000
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya yang terlaksana	5	100.000.000
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terlaksana	4	409.372.000



35	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pekerjaan BLUD puskesmas yang terlaksana	100	269.181.344.188
36	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Dinkes)	Jumlah pekerjaan BLUD Puskesmas yang dilaksanakan	40	78.463.129.124
37	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD KI Ageng Selo)	Jumlah pekerjaan BLUD RSUD KI Ageng Selo yang dilaksanakan	58	20.288.928.603
38	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD KI Ageng Getas Pendowo)	Jumlah pekerjaan BLUD RSUD KI Ageng Getas Pendowo yang dilaksanakan	45	17.060.696.827
39	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD dr R Soedjati)	Jumlah pekerjaan BLUD RSUD dr R Soedjati yang dilaksanakan	44	153.368.589.644
40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah	0,087	164.166.862.608



	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	penduduk		
41	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan UKP dan UKM yang tersedia	74	94.418.939.682
42	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah pengembangan rumah sakit	1	17.502.147.000
43	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pengembangan	2	1.567.199.160
44	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	2	3.873.514.100
45	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pengadaan Alat kesehatan/alat penunjang medic pelayanan kesehatan	10	58.854.735.350
46	Pengadaan Obat,	Jenis obat yang	70	4.225.599.873



	Vaksin (Dinkes)	disediakan		
47	Pengadaan Bahan Habis Pakai (Dinkes)	jenis bahan habis pakai yang disediakan	25	8.343.854.199
48	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Jumlah distribusi obat, vaksin dan BMHP ke puskesmas	360	51.890.000
49	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jenis layanan kesehatan UKM dan UKP yang diberikan	74	69.747.922.926
50	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Calon Jamaah Haji yang mendapatkan Pembinaan Kesehatan	1.190	200.404.000
51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan	22.041	127.741.000



		pelayanan antenatal sesuai standar		
52	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	21.317	397.517.000
53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	21.250	36.032.000
54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita (12 - 59 bulan) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	88.733	500.000.000
55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah orang usia 15 - 59	963.408	595.785.000



	Produktif	tahun di Kabupaten yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar		
56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi usia \geq 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu setahun	440.930	44.368.000
57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus \geq 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu	20.390	70.171.000



		setahun		
58	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jml ODGJ berat di dlm wilayah kerja Kab yg mendapatkan yankes jiwa sesuai standar	2.455	114.572.000
59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	11.561	199.000.000
60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	33.057	357.000.000
61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	jumlah kejadian KLB yang ditangani	15	34.685.000



62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah bayi dan balita yang ditimbang	112.950	2.745.078.800
63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan kesehatan Olahraga	30	230.655.000
64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa STBM di Wilayah Kab. Grobogan	115	263.308.500
65	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah media promosi kesehatan yang digunakan	4	8.537.060.000
66	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	jumlah bayi dan balita yang diimunisasi	33.750	14.000.000
67	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah penderita penyakit malaria yang dilayani	17	151.790.000
68	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapat	53.500	36.185.146.626



		jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan		
69	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah pekerjaan preventif dan promotif yang dilaksanakan	8	17.748.547.000
70	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas terakreditasi Utama	24	496.918.000
71	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang tertangani	20	40.665.000
72	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Menurunnya Kasus DBD	380	657.479.000
73	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah data dan informasi kesehatan yang dikelola	6	0
74	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah aplikasi yang dikelola	4	0



75	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	83,3	555.777.386
76	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Presentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	27	555.777.386
77	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	165	555.777.386
78	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN	Presentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	66	333.183.500



	MAKANAN MINUMAN	(apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan		
79	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	82	137.510.000
80	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri	jumlah PIRT yang memiliki SPPRT dilakukan Pengendalian dan	33	137.510.000



	Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengawasan serta tindak Tindak Lanjut		
81	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	44	45.741.500
82	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat	jumlah TPM yang diperiksa	40	45.741.500



	Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
83	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga yang diperiksa dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	32	149.932.000
84	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Jumlah PIRT yang diperiksa post market	79	149.932.000



	Pengawasan			
85	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	38	3.678.239.100
86	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	jumlah kelompok sasaran advokasi dan kemitraan	53	3.163.000.000
87	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah advokasi yang dilaksanakan	7	3.163.000.000
88	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	jumlah kelompok sasaran promosi	58.000	428.655.100
89	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	jumlah kelompok sasaran promosi	58.000	428.655.100



	Bersih dan Sehat			
90	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dibina	1.006	85.584.000
91	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah UKBM yang dibina	1.006	85.584.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran



diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah



ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan derajat	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran	230,29	117,51	100	Sangat Tinggi	BPS



	kesehatan	hidup)					
2	masyarakat	Angka Kematian Bayi	13,03	14,10	91,54	Sangat Tinggi	Kemenkes
3		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14,5	5,86	100	Sangat Tinggi	Kemenkes
4		Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk	0,087	1.07	100	Sangat Tinggi	Kemenkes
5		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan UKP dan UKM yang tersedia	74	84,00	100	Sangat Tinggi	Kemenkes
6		Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	-	100	Sangat Tinggi	
7		Jumlah pengembangan rumah sakit (RSUD dr R Soedjati)	1	1,00	100	Sangat Tinggi	
8		Jumlah pengembangan rumah sakit	3	2,00	66,67	Sedang	



	(RSUD Ki Ageng Selo)					
9	Jumlah pengembangan rumah sakit (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	2	3,00	100	Sangat Tinggi	
10	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pengembangan	2	5,00	100	Sangat Tinggi	
11	Jumlah Fasilitas Kesehatan lain yang dilakukan pengembangan	0	-	100	Sangat Tinggi	
12	Jumlah Fasyankes yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	1	1,00	100	Sangat Tinggi	
13	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	1	-	0	Sangat Rendah	
14	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan	2	3,00	100,00	Sangat Tinggi	



		kesehatan					
15		Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan (RSUD dr R Soedjati)	1	-	0	Sangat Rendah	
16		Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Selo)	1	-	0	Sangat Rendah	
17		Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	0	-	100	Sangat Tinggi	
18		Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik pelayanan kesehatan	10	10,00	100	Sangat Tinggi	
19		Jumlah paket	1	1,00	100,00	Sangat	



		pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik pelayanan kesehatan (RSUD dr R Soedjati)				Tinggi	
20		Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Selo)	2	2,00	100	Sangat Tinggi	
21		Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	2	5,00	100	Sangat Tinggi	
22		Jenis obat yang Disediakan (RSUD dr R Soedjati)	70	92,00	100	Sangat Tinggi	
23		Jenis obat yang disediakan (RSUD Ki Ageng Selo)	5	-	0	Sangat Rendah	
24		Jenis obat yang disediakan (RSUD Ki Ageng Getas)	70	-	0	Sangat Rendah	



		Pendowo)					
25		Jenis bahan habis pakai yang disediakan (RSUD dr R Soedjati)	25	26,00	100	Sangat Tinggi	
26		Jenis bahan habis pakai yang disediakan (RSUD Ki Ageng Selo)	5	-	0	Sangat Rendah	
27		Jenis bahan habis pakai yang disediakan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	50	-	0	Sangat Rendah	
28		Jumlah distribusi obat, vaksin dan BMHP ke puskesmas	360	360,00	100	Sangat Tinggi	
29		Presentase capaian hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100	93,92	93,92	Sangat Tinggi	
30		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	5	5,29	100	Sangat Tinggi	
31		Presentase jenis layanan kesehatan UKM dan UKP	74	65,71	88,80	Tinggi	



		yang diberikan					
32		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	22041	18.437,00	83,65	Tinggi	
33		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	21317	18.717,00	87,80	Tinggi	
34		Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	21250	18.627,00	87,66	Tinggi	
35		Jumlah balita (12 - 59 bulan) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	88733	79.520,00	89,62	Tinggi	
36		Jumlah anak usia	203.380	194.480,00	95,62	Sangat	



		pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran				Tinggi	
37		Jumlah orang usia 15 - 59 tahun di Kabupaten yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	963.408	831.963,00	86,36	Tinggi	
38		Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	192.215	186.150,00	96,84	Sangat Tinggi	
39		Jumlah penderita Hipertensi usia \geq 15 tahun di dalam wilayah kerjanya	440.930	278.926,00	63,26	Rendah	



		yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu setahun					
40		Jumlah penderita Diabetes Melitus \geq 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu setahun	20.390	24.010,00	100	Sangat Tinggi	
41		Jumlah ODGJ berat di dlm wilayah kerja Kab yang mendapatkan yankes jiwa sesuai standar	2.445	3.020,00	100	Sangat Tinggi	
42		Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu	11.561	14.729,00	100	Sangat Tinggi	



		tahun					
43		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	33.057	42.072,00	100	Sangat Tinggi	
44		Jumlah kejadian KLB yang ditangani	15	2,00	100	Sangat Tinggi	
45		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pasca bencana	70	84,00	100	Sangat Tinggi	
46		Jumlah bayi dan balita yang ditimbang	112.950	84.492,00	74,80	Sedang	
47		Jumlah ibu nifas yang didampingi IMD (Inisiasi Menyusu Dini)	1.481	1.336,00	90,21	Tinggi	
48		Jumlah bayi umur 6 bl dapat ASI Eksklusif	2.160	1.518,00	70,28	Sedang	



49	Jumlah pasar yang diawasi dalam penggunaan garam beryodium	18	18,00	100	Sangat Tinggi	
50	Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan kesehatan Olahraga	30	30,00	100	Sangat Tinggi	
51	Jumlah Desa STBM di Wilayah Kab. Grobogan	115	160,00	100	Sangat Tinggi	
52	Jumlah Puskesmas dan RS yang melakukan pengelolaan limbah Fasyankes	38	42,00	100	Sangat Tinggi	
53	Jumlah media promosi kesehatan yang digunakan	4	5,00	100	Sangat Tinggi	
54	Jumlah keluarga yang mendapatkan edukasi keluarga sehat	250.000	366.227,00	100	Sangat Tinggi	
55	Jumlah	30	30,00	100	Sangat	



		puskesmas yang dibina dalam pelayanan tradisional				Tinggi	
56		Jumlah bayi dan balita yang diimunisasi	33.750	35.327,00	100	Sangat Tinggi	
57		Jumlah anak sekolah yang diimunisasi	59.300	65.284,00	100	Sangat Tinggi	
58		Jumlah Pelacakan Epidemiologis KLB PD3I, Penyakit Menular	200	84,00	100	Sangat Tinggi	
59		Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	961.002	288.712,00	30,04	Sangat Rendah	
60		Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	2443	3.118,00	100	Sangat Tinggi	
61		Jumlah Calon Jamaah Haji yang mendapatkan	1190	1.157,00	97,23	Sangat Tinggi	



		Pembinaan Kesehatan					
62		Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan kesehatan	140	3,00	2,14	Sangat Rendah	
63		jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pasca krisis kesehatan	70	84,00	100	Sangat Tinggi	
64		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada Pasien Covid-19	70	84,00	100	Sangat Tinggi	
65		Jumlah penderita penyakit malaria yang dilayani	17	26,00	100	Sangat Tinggi	
66		Jumlah penderita penyakit leptospirosis yang dilayani	13	4,00	100	Sangat Tinggi	
67		Jumlah penderita	4	9,00	100	Sangat	



		penyakit Filariasis yang dilayani				Tinggi	
68		Jumlah penderita covid 19	1000	116,00	100	Sangat Tinggi	
69		Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	53.500	74.500,00	100	Sangat Tinggi	
70		Jumlah Deteksi dini penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan Sekolah	45	-	0	Sangat Rendah	
71		Jumlah pengiriman specimen Penyakit Potensial KLB ke laboratorium rujukan atau laboratorium nasional	147	83,00	56,46	Rendah	
72		Jumlah kecamatan yang dibina kab sehat	13	19,00	100	Sangat Tinggi	
73		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang	39	41,00	100	Sangat Tinggi	



		melakukan Telemedicine					
74		Jumlah pekerjaan preventif dan promotif yang dilaksanakan	8	8,00	100	Sangat Tinggi	
75		Jumlah puskesmas terakreditasi Utama	24	30,00	100	Sangat Tinggi	
76		Jumlah rumah sakit umum daerah tipe D Terakreditasi	2	2,00	100	Sangat Tinggi	
77		Jumlah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang tertangani	20	9,00	100	Sangat Tinggi	
78		Menurunnya Kasus DBD	380	332,00	100	Sangat Tinggi	
79		Jumlah kasus keawatdaruratan medis yang ditangani	280	367,00	100	Sangat Tinggi	
80		Jumlah kasus Covid-19 yang dievakuasi	140	0	100	Sangat Tinggi	
81		Jumlah data dan informasi	6	6,00	100	Sangat Tinggi	



		kesehatan yang dikelola					
82		Jumlah data dan informasi kesehatan yang dikelola	6	6,00	100	Sangat Tinggi	
83		Jumlah aplikasi yang dikelola	4	4,00	100	Sangat Tinggi	
84		Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39	42,00	100	Sangat Tinggi	
85		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan	70	70,00	100	Sangat Tinggi	
86		Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	70	84,00	100	Sangat Tinggi	



87	Tersedianya Sistem Rujukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	39	42,00	100	Sangat Tinggi	
88	Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	83,3	90,00	100	Sangat Tinggi	
89	Presentase Tenaga Kesehatan yang mempunyai Izin	90	90,00	100	Sangat Tinggi	
90	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mempunyai izin	650	650,00	100	Sangat Tinggi	
91	Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	75	75,00	100	Sangat Tinggi	
92	Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai kebutuhan	55,25	91,08	100	Sangat Tinggi	
93	Jumlah Dokumen Perencanaan	4	4,00	100	Sangat Tinggi	



		Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					
94		Jumlah dokumen perencanaan tenaga kesehatan	4	4,00	100	Sangat Tinggi	
95		Presentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	27	51,83	100	Sangat Tinggi	
96		Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	165	235,00	100	Sangat Tinggi	
97		Jumlah Petugas Laborat Puskesmas yang dibina	34	34,00	100	Sangat Tinggi	
98		Presentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar	66	70,00	100	Sangat Tinggi	



		dan persyaratan perizinan					
99		Presentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin	73	73,00	100	Sangat Tinggi	
100		Jumlah sarana farmasi yang diawasi	156	155,00	99,36	Sangat Tinggi	
101		Jumlah dokumen Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	1,00	100	Sangat Tinggi	
102		Presentase industri rumah tangga yang mempunyai izin	63	92,16	100	Sangat Tinggi	
103		Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah	82	70,00	85,37	Tinggi	



		Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					
104		Jumlah PIRT yang memiliki SPPRT dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Tindak Lanjut	33	69,00	100	Sangat Tinggi	
105		Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	70	84,72	100	Sangat Tinggi	
106		Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	44	6,00	13,64	Sangat Rendah	



		Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					
107		Jumlah TPM yang diperiksa	40	188,00	100	Sangat Tinggi	
108		Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	90	37,00	41,11	Sangat Rendah	
109		Jumlah TPM yang distikerisasi	90	37,00	41,11	Sangat Rendah	
110		Jumlah industri rumah tangga yang diperiksa dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah	32	51,00	100	Sangat Tinggi	



		Tangga					
111		Jumlah PIRT yang diperiksa post market	79	87	100	Sangat Tinggi	
112		Jumlah pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan minuman (Sampling dan pengujian pangan industri rumah tangga)	14	36,00	100	Sangat Tinggi	
113		Jumlah dokumen perizinan industri rumah tangga	1	1,00	100	Sangat Tinggi	
114		Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	38	62,00	100	Sangat Tinggi	
115		Jumlah kelompok sasaran advokasi dan kemitraan	53	78,00	100	Sangat Tinggi	
116		Jumlah advokasi yang dilaksanakan	7	8,00	100	Sangat Tinggi	
117		Jumlah kemitraan yang dilaksanakan	8	8,00	100	Sangat Tinggi	
118		Jumlah Desa/kelurahan yang dibina Desa Siaga	38	62,00	100	Sangat Tinggi	



119		Jumlah kelompok sasaran promosi	58.000	69.116,00	100	Sangat Tinggi	
120		Jumlah kelompok sasaran promosi	58.000	69.116,00	100	Sangat Tinggi	
121		Jumlah UKBM yang dibina	1006	1.369,00	100	Sangat Tinggi	
122		Jumlah UKBM yang dibina	1006	1.369,00	100	Sangat Tinggi	
1	Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan rujukan	Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi	60	83,33	100	Sangat Tinggi	
1	Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP	70,20	70,16	100	Sangat Tinggi	
2	didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang	Nilai IKM	76,70	82,39	100	Sangat Tinggi	
3		Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	100	100	100	Sangat Tinggi	
4		Cakupan Pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	100	103,7	100	Sangat Tinggi	
5		Persentase pemenuhan	100	100	100	Sangat Tinggi	



	baik	dokumen penilaian manajemen risiko					
6		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Tahunan yang Disusun Sesuai Pedoman yang Berlaku	100	100	100	Sangat Tinggi	
7		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan yang Disusun Tepat Waktu	2	2	100	Sangat Tinggi	
8		Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Urusan Kesehatan yang disusun	1	1	100	Sangat Tinggi	
9		Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	100	100	100	Sangat Tinggi	
10		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	1.400	1.655	100	Sangat Tinggi	



11	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	463	344	74,30	Sedang	
12	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada 10 Perangkat Daerah	100	100	100	Sangat Tinggi	
13	Jumlah kegiatan penatausahaan BMD SKPD	1	1	100	Sangat Tinggi	
14	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya	100	67,00	66,70	Sedang	
15	Jumlah pengadaan pakaian dan atribut	120	0	0	Sangat Rendah	
16	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	12	8	66,67	Sedang	
17	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100	240	100	Sangat Tinggi	
18	Jumlah persediaan	15	15	100	Sangat	



		komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Tinggi	
19		Jumlah persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6	6	100	Sangat Tinggi	
20		Jumlah persediaan Peralatan rumah tangga	40	40	100	Sangat Tinggi	
21		Jumlah persediaan Bahan logistik kantor	7	7	100	Sangat Tinggi	
22		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	11	11	100	Sangat Tinggi	
23		Jumlah jenis bahan bacaan dan koran	2	2	100	Sangat Tinggi	
24		Jumlah persediaan ATK	60	60	100	Sangat Tinggi	
25		Jumlah perjalanan dinas keluar dan dalam daerah	450	1.278	100	Sangat Tinggi	
26		Persentase barang milik daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	100	100	100	Sangat Tinggi	



27	Jumlah jenis pengadaan mebeler	2	2	100	Sangat Tinggi	
28	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung kantor yang diadakan	7	7	100	Sangat Tinggi	
29	Persentase jasa penunjang yang tersedia sesuai kebutuhan	100	100	100	Sangat Tinggi	
30	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia setiap bulan	750	650	86,67	Tinggi	
31	Jumlah rekening langganan komunikasi, langganan air dan langganan listrik	144	144	100	Sangat Tinggi	
32	Jumlah tenaga non PNS yang dibayar	9.936	10.128	100	Sangat Tinggi	
33	Jumlah tenaga non PNS yang dibayar	252	344	100	Sangat Tinggi	
34	Jumlah tenaga non PNS yang dibayar	840	773	92,02	Sangat Tinggi	



35	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	100	100	Sangat Tinggi	
36	Jenis peralatan dan mesin lainnyayang dilakukan pemeliharaan	4	4	100	Sangat Tinggi	
37	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya yang terlaksana	5	5	100	Sangat Tinggi	
38	Jenis Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terlaksana	4	4	100	Sangat Tinggi	
39	Persentase pekerjaan BLUD puskesmas yang terlaksana	100	100	100	Sangat Tinggi	
40	Jumlah pekerjaan	40	40	100	Sangat	



		BLUD Puskesmas yang dilaksanakan				Tinggi	
41		Jumlah pekerjaan BLUD RSUD KI Ageng Selo yang dilaksanakan	58	58	100	Sangat Tinggi	
42		Jumlah pekerjaan BLUD RSUD KI Ageng Getas Pendowo yang dilaksanakan	45	47	100	Sangat Tinggi	
43		Jumlah pekerjaan BLUD RSUD dr R Soedjati yang dilaksanakan	44	49	100	Sangat Tinggi	

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, diketahui bahwa indikator kinerja sesuai RPJMD Kabupaten Grobogan yang ditetapkan sebanyak 166 indikator. Adapun yang berhasil diselesaikan sesuai target sebanyak 128 indikator (77,10%). Rata - rata capaian indikator Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan sebesar 88,67%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230,29	230,29	100	230,29	117,51	100
		Angka Kematian Bayi	13,03	13,03	99,31	13,03	14,10	91,54
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14,5	14,50	100	14,5	5,86	100
		Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk	60	1,02	100	0,087	1,07	100
		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan UKP dan UKM yang tersedia	74	77	100	74	84,00	100
		Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1	100	0	-	100
		Jumlah	0	-	100	1	1,00	100



		pengembangan rumah sakit (RSUD dr R Soedjati)						
		Jumlah pengembangan rumah sakit (RSUD Ki Ageng Selo)	2	2	100	3	2,00	66,67
		Jumlah pengembangan rumah sakit (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	1	1	100	2	3,00	100
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan pengembangan	2	2	100	2	5,00	100
		Jumlah Fasilitas Kesehatan lain yang dilakukan pengembangan	1	1	100	0	-	100
		Jumlah Fasyankes yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	0	0	100	1	1,00	100
		Jumlah rumah Dinas tenaga kesehatan yang dilakukan	0	0	100	1	-	0



		rehabilitasi dan pemeliharaan						
		Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	2	2	100	2	3,00	100
		Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan (RSUD dr R Soedjati)	0	0	100	1	-	0
		Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Selo)	0	0	100	1	-	0
		Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	0	0	100	0	-	100



		Jumlah paket pengadaan alat kesehatan /alat penunjang medik pelayanan kesehatan	15	15	100	10	10,00	100
		Jumlah paket pengadaan alat kesehatan /alat penunjang medik pelayanan kesehatan (RSUD dr R Soedjati)	1	13	100	1	1,00	100
		Jumlah paket pengadaan alat kesehatan /alat penunjang medik pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Selo)	2	2	100	2	2,00	100
		Jumlah paket pengadaan alat kesehatan /alat penunjang medik pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	1	1	100	2	5,00	100
		Jenis obat yang disediakan	70	122	100	70	92,00	100
		Jenis obat yang disediakan	0	0	100	5	-	0



		(RSUD Ki Ageng Selo)						
		Jenis obat yang disediakan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	290	200	68,97	70	-	0
		Jenis bahan habis pakai yang disediakan	20	30	100	25	26,00	100
		Jenis bahan habis pakai yang disediakan (RSUD Ki Ageng Selo)	3	3	100	5	-	0
		Jenis bahan habis pakai yang disediakan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	86	75	87,21	50	-	0
		Jumlah distribusi obat, vaksin dan BMHP ke puskesmas	720	720	100	36	360,00	100
		Presentase capaian hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100	86,54	86,54	100	93,92	93,92
		Prevalensi wasting	6	4,3	76,67	5	5,29	100



		(kurus dan sangat kurus) pada balita						
		Presentase jenis layanan kesehatan UKM dan UKP yang diberikan	70	70	100	74	65,71	88,80
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	21793	18.788	86,21	22041	18.437,00	83,65
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	21386	19.172	89,65	21317	18.717,00	87,80
		Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	21343	18.988	88,97	21250	18.627,00	87,66
		Jumlah balita (12 -59 bulan) yang mendapat	89512	75.885	84,78	88733	79.520,00	89,62



		pelayanan kesehatan sesuai standar						
		Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	199.729	198.793	99,53	203.380	194.480,00	95,62
		Jumlah orang usia 15 - 59 tahun di Kabupaten yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	961.002	614.969	63,99	963.408	831.963,00	86,36
		Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun	187.215	171.780	91,76	192.215	186.150,00	96,84



		waktu satu tahun						
		Jumlah penderita Hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu setahun	440.490	286.591	65,06	440.930	278.926,00	63,26
		Jumlah penderita Diabetes Melitus ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu setahun	20.329	20.677	100	20.390	24.010,00	100
		Jumlah ODGJ berat di dlm wilayah kerja Kab yang mendapatkan yankes jiwa sesuai standar	2.443	2.453	100	2.445	3.020,00	100



		Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	12.117	9.001	74,28	11.561	14.729,00	100
		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	29.531	25.765	87,25	33.057	42.072,00	100
		Jumlah kejadian KLB yang ditangani	15	2	86,67	15	2,00	100
		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pasca bencana	70	70	100	70	84,00	100
		Jumlah bayi dan balita yang di timbang	112.950	82.924	73,42	112.950	84.492,00	74,80
		Jumlah ibu nifas yang	1.411	1.411	100	1.481	1.336,00	90,21



		didampingi IMD (Inisiasi Menyusu Dini)						
		Jumlah bayi umur 6 bl dapat ASI Eksklusif	2.067	868	41,99	2.160	1.518,00	70,28
		Jumlah pasar yang diawasi dalam penggunaan garam beryodium	18	18	100	18	18,00	100
		Jumlah Puskesmas yang menyelenggara kan kesehatan kerja dasar dan kesehatan Olahraga	30	30	100	30	30,00	100
		Jumlah Desa STBM di Wilayah Kab. Grobogan	85	102	100	115	160,00	100
		Jumlah Puskesmas dan RS yang melakukan pengelolaan limbah Fasyankes	38	41	100	38	42,00	100
		Jumlah media promosi kesehatan yang digunakan	0	4	100	4	5,00	100



		Jumlah keluarga yang mendapatkan edukasi keluarga sehat	0	0	100	250.000	366.227,00	100
		Jumlah puskesmas yang dibina dalam pelayanan tradisional	0	30	100	30	30,00	100
		Jumlah bayi dan balita yang diimunisasi	33.950	44.292	100	33.750	35.327,00	100
		Jumlah anak sekolah yang diimunisasi	59.500	62.707	100	59.300	65.284,00	100
		Jumlah Pelacakan Epidelmiologis KLB PD3I, Penyakit Menular dan Keracunan Makanan	300	7.122	100	200	84,00	100
		Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	0	79.588	100	961.002	288.712,00	30,04
		Jumlah orang yang mendapatkan	0	0	100	2443	3.118,00	100



		Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza						
		Jumlah Calon Jamaah Haji yang mendapatkan Pembinaan Kesehatan	0	633	100	1190	1.157,00	97,23
		Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan kesehatan	0	20	100	140	3,00	2,14
		jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pasca krisis kesehatan	0	38	100	70	84,00	100
		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada Pasien Covid-19	0	38	100	70	84,00	100
		Jumlah	20	17	85	17	26,00	100



		penderita penyakit malaria yang dilayani						
		Jumlah penderita penyakit leptospirosis yang dilayani	10	6	60	13	4,00	100
		Jumlah penderita penyakit Filariasis yang dilayani	6	7	100	4	9,00	100
		Jumlah penderita covid 19	2000	2.493	100	1000	116,00	100
		Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	51.500	78.988	100	53.500	74.500,00	100
		Jumlah Deteksi dini penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan Sekolah	0	0	100	45	-	0
		Jumlah pengiriman specimen Penyakit Potensial KLB ke laboratorium	0	7.070	100	147	83,00	100



		rujukan atau laboratorium nasional						
		Jumlah kecamatan yang dibina kab sehat	10	19	100	13	19,00	100
		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan Telemedicine	39	39	100	39	41,00	100
		Jumlah pekerjaan preventif dan promotif yang dilaksanakan	8	8	100	8	8,00	100
		Jumlah puskesmas terakreditasi Utama	0	0	100	24	30,00	100
		Jumlah rumah sakit umum daerah tipe D Terakreditasi	0	6	100	2	2,00	100
		Jumlah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang tertangani	0	5	83,33	20	9,00	100
		Menurunnya Kasus DBD	410	1.298	31,59	380	332,00	100
		Jumlah kasus Kegawatdaruratan medis yang	280	256	91,43	280	367,00	100



		ditangani						
		Jumlah kasus Covid-19 yang dievakuasi	130	0	-	140	0	100
		Jumlah data dan informasi kesehatan yang dikelola	6	6	100	6	6,00	100
		Jumlah data dan informasi kesehatan yang dikelola	6	6	100	6	6,00	100
		Jumlah aplikasi yang dikelola	0	0	100	4	4,00	100
		Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	7	12	100	39	42,00	100
		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan	70	73	100	70	70,00	100



		Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	70	78	100	70	84,00	100
		Tersedianya Sistem Rujukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	39	40	100	39	42,00	100
		Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan Sesuai standar	66,6	93,33	100	83,3	90,00	100
		Presentase Tenaga Kesehatan yang mempunyai Izin	80	82,20	100	90	90,00	100
		Jumlah Tenaga Kesehatan yang mempunyai izin	1.750	3.518	100	650	650,00	100
		Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100	344	100	75	75,00	100



		Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai kebutuhan	53,20	81,05	100	55,25	91,08	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendaayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota	4	2	50	4	4,00	100
		Jumlah dokumen perencanaan tenaga kesehatan	4	2,30	50	4	4,00	100
		Presentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	25,25	2,30	9,11	27	51,83	100
		Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	150	114	76	165	235,00	100
		Jumlah Petugas Laborat	0	16	100	34	34,00	100



		Puskesmas yang dibina						
		Presentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	64	100	100	66	70,00	100
		Presentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin	72	100	100	73	73,00	100
		Jumlah sarana farmasi yang diawasi	153	212	100	156	155,00	99,36
		Jumlah dokumen Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	1	100	1	1,00	100
		Presentase industri rumah	62	100	100			



		tangga yang mempunyai izin						
		Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	81	80	98,77	82	70,00	85,37
		Jumlah PIRT yang memiliki SPPRT dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Tindak Lanjut	32	80	100	33	69,00	100
		Prosentase Tempat Pengelolaan	65	70,99	100	70	84,72	100



		Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)						
		Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	42	10	23,81	4	6,00	100
		Jumlah TPM yang diperiksa	30	10	33,33	40	188,00	100
		Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	90	4	4,44	90	37,00	41,11
		Jumlah TPM yang	90	4	4,44	90	37,00	41,11



		distikerisasi						
		Jumlah industri rumah tangga yang diperiksa dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	31	26	83,87	32	51,00	100
		Jumlah PIRT yang diperiksa post market	77	72	93,51	79	87,00	100
		Jumlah pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan minuman (Sampling dan pengujian pangan industri rumah tangga)	13	6	46,15	14	36,00	100
		Jumlah dokumen perizinan industri rumah tangga	1	1	100	1	1,00	100
		Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	33	46	100	38	62,00	100



		Jumlah kelompok sasaran advokasi dan kemitraan	46	46	100	53	78,00	100
		Jumlah advokasi yang dilaksanakan	6	6	100	7	8,00	100
		Jumlah kemitraan yang dilaksanakan	7	7	100	8	8,00	100
		Jumlah Desa /kelurahan yang dibina Desa Siaga	33	46	100	38	62,00	100
		Jumlah kelompok sasaran promosi	40	41.644	100	58.000	69.116,00	100
		Jumlah kelompok sasaran promosi	40	41.644	100	58.000	69.116,00	100
		Jumlah UKBM yang dibina	986	1.225	100	1006	1.369,00	100
		Jumlah UKBM yang dibina	986	1.225	100	1006	1.369,00	100
		Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi		56,06	93,43	60	83,33	100
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP	70,20	70,16	100	70,20	70,16	100



	dan Pelayanan Publik yang berkualitas							
		Nilai IKM	76,70	82,95	100	76,70	82,39	100
		Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	100	100	100	100	100	100
		Cakupan Pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	100	89	89	100	103,7	100
		Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	100	100	100	100	100	100
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Tahunan yang Disusun Sesuai Pedoman yang Berlaku	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan	2	2	100	2	2	100



		dan Penganggaran Tahunan yang Disusun Tepat Waktu						
		Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Urusan Kesehatan yang disusun	1	1	100	1	1	100
		Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	100	100	100	100	100	100
		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (Dinkes)	1.400	1.419	100	1.400	1.655	100
		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (RSUD dr R Soedjati)	453	362	79,91	463	344	74,30
		Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	0	0	100	100	100	100
		Jumlah	0	0	100	1	1	100



		kegiatan Penatausahaan BMD SKPD						
		Jumlah pengadaan pakaian dan atribut	0	0	100	120	0	0
		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	12	8	66,67	12	8	66,67
		Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	240	100
		Jumlah persediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	15	15	100	15	15	100
		Jumlah persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	100	6	6	100
		Jumlah persediaan Peralatan rumah tangga	40	40	100	40	40	100
		Jumlah	7	7	100	7	7	100



		persediaan Bahan logistik kantor						
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	10	10	100	11	11	100
		Jumlah jenis bahan bacaan dan koran	2	2	100	2	2	100
		Jumlah persediaan ATK	60	60	100	60	60	100
		Jumlah perjalanan dinas keluar dan dalam daerah	400	1.412	100	450	1.278	100
		Persentase barang milik daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100	100
		Jumlah jenis pengadaan mebeler	0	0	100	2	2	100
		Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung kantor yang diadakan	5	5	100	7	7	100
		Persentase jasa penunjang yang tersedia sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100	100



		Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia setiap bulan	700	700	100	750	650	86,67
		Jumlah rekening langganan komunikasi, langganan air dan langganan listrik	144	144	100	144	144	100
		Jumlah tenaga non PNS yang dibayar (Dinkes)	9.936	9.972	100	9.936	10.128	100
		Jumlah tenaga non PNS yang dibayar (RSUD Ki Ageng Selo)	252	30	11,90	252	344	100
		Jumlah tenaga non PNS yang dibayar (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	840	173	20,60	840	773	92,02
		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100
		Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	4	4	100	4	4	100
		Jumlah Pemeliharaan /rehabilitasi gedung dan bangunan	4	4	100	5	5	100



		lainnya yang terlaksana						
		Jenis Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terlaksana	4	3	100	4	4	100
		Persentase pekerjaan BLUD puskesmas yang terlaksana	100	100	75	100	100	100
		Jumlah pekerjaan BLUD Puskesmas yang dilaksanakan	37	41	100	40	40	100
		Jumlah pekerjaan BLUD RSUD KI Ageng Selo yang dilaksanakan	100	68	100	58	58	100
		Jumlah pekerjaan BLUD RSUD KI Ageng Getas Pendowo yang dilaksanakan	58	41	97,62	45	47	100
		Jumlah	100	46	100	44	49	100



		pekerjaan BLUD RSUD dr R Soedjati yang dilaksanakan						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, diketahui bahwa indikator kinerja sesuai RPJMD Kabupaten Grobogan yang ditetapkan sebanyak 166 indikator. Adapun yang berhasil diselesaikan sesuai target sebanyak 128 indikator (77,10%). Rata - rata capaian indikator Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan sebesar 88,67%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,02	75,3	100%
	Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	117,51	137,36	86%
		Angka Kematian Bayi	14,1	12,04	117%



		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	5,86	14	42%
2	Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan rujukan	Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi	83,33	65	128%
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai SAKIP	70,16	73,5	95%
		Nilai IKM	82,39	79,7	103%
	Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP	70,16	73,5	95%
		Nilai IKM	82,39	79,7	103%

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, diketahui bahwa tujuan / sasaran dari tingkat kemajuan capaian sasaran strategis yang mengalami kegagalan adalah Tujuan/Sasaran meningkatkan derajat kesehatan dengan indikator dari prevalensi



stunting yang hanya tercapai 42 % karena capaian prevalensi gizi buruk tahun 2022 sebesar 0,03 dan meningkat menjadi 0,07 di tahun 2023. Gizi buruk naik dikarenakan banyak balita yang tidak lulus ASI Eksklusif, adanya balita yang sakit kronis seperti pneumonia, TBC sehingga mengakibatkan gangguan penyerapan nutrisi, serta adanya keterlambatan penyakit yang akan memperburuk status gizi balita.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Grobogan lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	75,02	72,13	104%
	Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita	Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita	117,51	183	64%
		Angka Kematian Bayi	14,1	11	128%
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	5,86	6,4	92%
	Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan	Persentase rumah sakit rujukan	83,33	80	104%



	rujukan				
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik DAN Pelayanan Publik yang berkualitas	Nilai SAKIP	70,16	75,65	93%
		Nilai IKM	82,39	94,91	87%
	Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di dukung dengan manajemen	Nilai SAKIP	70,16	75,65	93%
		Nilai IKM	82,39	94,91	87%



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230,29	117,51	100	berhasil	
		Angka Kematian Bayi	13,03	14,10	91,54	gagal	
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14,5	5,86	100	berhasil	
		Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk	0,087	1.07	100	berhasil	
		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan UKP dan UKM yang tersedia	74	84,00	100	berhasil	
		Jumlah Pembangunan Fasilitas	0	-	100	berhasil	



		Kesehatan Lainnya					
		Jumlah Pengembangan rumah sakit (RSUD dr R Soedjati)	1	1,00	100	berhasil	
		Jumlah Pengembangan rumah sakit (RSUD Ki Ageng Selo)	3	2,00	100	berhasil	
		Jumlah Pengembangan rumah sakit (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	2	3,00	100	berhasil	
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan pengembangan	2	5,00	100	berhasil	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan lain yang dilakukan pengembangan	0	-	100	berhasil	
		Jumlah Fasyankes yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	1	1,00	100	berhasil	
		Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	1	0	0	gagal	



		Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	2	3,00	100	berhasil	
		Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan (RSUD dr R Soedjati)	1	0	0	gagal	
		Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Selo)	1	0	0	gagal	
		Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	0	-	100	berhasil	
		Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang	10	10,00	100	berhasil	



		medik pelayanan kesehatan					
		Jumlah paket pengadaan alat kesehatan /alat penunjang medik pelayanan kesehatan (RSUD dr R Soedjati)	1	1,00	100	berhasil	
		Jumlah paket pengadaan alat kesehatan /alat penunjang medik pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Selo)	2	2,00	100	berhasil	
		Jumlah paket pengadaan alat kesehatan /alat penunjang medik pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	2	5,00	100	berhasil	
		Jenis obat yang disediakan	70	92,00	100	berhasil	
		Jenis obat yang disediakan (RSUD Ki Ageng Selo)	5	0	0	gagal	
		Jenis obat yang disediakan	70	-	0	gagal	



		(RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)					
		Jenis bahan habis pakai yang disediakan	25	26,00	100	berhasil	
		Jenis bahan habis pakai yang disediakan (RSUD Ki Ageng Selo)	5	0	0	gagal	
		Jenis bahan habis pakai yang disediakan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	50	0	0	gagal	
		Jumlah distribusi obat, vaksin dan BMHP ke puskesmas	360	360,00	100	berhasil	
		Presentase capaian hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100	93,92	93,92	berhasil	
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	5	5,29	100	berhasil	
		Presentase jenis layanan	74	65,71	88,80	berhasil	



		kesehatan UKM dan UKP yang diberikan					
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	22041	18.437,00	83,65	berhasil	
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	21317	18.717,00	87,80	berhasil	
		Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	21250	18.627,00	87,66	berhasil	
		Jumlah balita (12 - 59 bulan) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	88733	79.520,00	89,62	berhasil	
		Jumlah anak usia pendidikan dasar yang	203.380	194.480,00	95,62	berhasil	



		mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten /kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran					
		Jumlah orang usia 15 - 59 tahun di Kabupaten yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	963.408	831.963,00	86,36	berhasil	
		Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	192.215	186.150,00	96,84	berhasil	
		Jumlah penderita Hipertensi usia	440.930	278.926,00	63,26	gagal	



		≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu setahun					
		Jumlah penderita Diabetes Melitus ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu setahun	20.390	24.010,00	100	berhasil	
		Jumlah ODGJ berat di dlm wilayah kerja Kab yang mendapatkan yankes jiwa sesuai standar	2.445	3.020,00	100	berhasil	
		Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan	11.561	14.729,00	100	berhasil	



		penunjang dalam kurun waktu satu tahun					
		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	33.057	42.072,00	100	Berhasil	
		Jumlah kejadian KLB yang ditangani	15	2,00	100	berhasil	
		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pasca bencana	70	84,00	100	berhasil	
		Jumlah bayi dan balita yang ditimbang	112.950	84.492,00	74,80	berhasil	
		Jumlah ibu nifas yang didampingi IMD (Inisiasi Menyusu Dini)	1.481	1.336,00	90,21	berhasil	
		Jumlah bayi umur 6 bl dapat ASI Eksklusif	2.160	1.518,00	70,28	berhasil	



		Jumlah pasar yang diawasi dalam penggunaan garam beryodium	18	18,00	100	berhasil	
		Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan kesehatan Olahraga	30	30,00	100	berhasil	
		Jumlah Desa STBM di Wilayah Kab. Grobogan	115	160,00	100	berhasil	
		Jumlah Puskesmas dan RS yang melakukan pengelolaan limbah Fasyankes	38	42,00	100	berhasil	
		Jumlah media promosi kesehatan yang digunakan	4	5,00	100	berhasil	
		Jumlah keluarga yang mendapatkan edukasi keluarga sehat	250.000	366.227,00	100	berhasil	
		Jumlah	30	30,00	100	berhasil	



		puskesmas yang dibina dalam pelayanan tradisional					
		Jumlah bayi dan balita yang diimunisasi	33.750	35.327,00	100	berhasil	
		Jumlah anak sekolah yang diimunisasi	59.300	65.284,00	100	berhasil	
		Jumlah Pelacakan Epidelmiologis KLB PD3I, Penyakit Menular dan Keracunan Makanan	200	84,00	100	berhasil	
		Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	961.002	288.712,00	30,04	gagal	
		Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	2443	3.118,00	100	berhasil	
		Jumlah Calon Jamaah Haji yang mendapatkan Pembinaan Kesehatan	1190	1.157,00	97,23	berhasil	



		Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan kesehatan	140	3,00	2,14	gagal	
		jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pasca krisis kesehatan	70	84,00	100	berhasil	
		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada Pasien Covid-19	70	84,00	100	berhasil	
		Jumlah penderita penyakit malaria yang dilayani	17	26,00	100	berhasil	
		Jumlah penderita penyakit leptospirosis yang dilayani	13	4,00	100	berhasil	
		Jumlah penderita penyakit Filariasis yang dilayani	4	9,00	100	berhasil	
		Jumlah	1000	116,00	100	berhasil	



		penderita covid 19					
		Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	53.500	74.500,00	100	berhasil	
		Jumlah Deteksi dini penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan Sekolah	45	-	0	gagal	Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Napza di fasyankes dan sekolah
		Jumlah pengiriman specimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium rujukan atau Laboratorium nasional	147	83,00	56,46	berhasil	
		Jumlah kecamatan yang dibangun kab sehat	13	19,00	100	berhasil	
		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan Telemedicine	39	41,00	100	berhasil	
		Jumlah pekerjaan preventif dan	8	8,00	100	berhasil	



		promotif yang dilaksanakan					
		Jumlah puskesmas terakreditasi Utama	24	30,00	100	berhasil	
		Jumlah rumah sakit umum daerah tipe D Terakreditasi	2	2,00	100	berhasil	
		Jumlah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang tertangani	20	9,00	100	berhasil	
		Menurunnya Kasus DBD	380	332,00	100	berhasil	
		Jumlah kasus Kegawatdaruratan medis yang ditangani	280	367,00	100	berhasil	
		Jumlah kasus Covid-19 yang dievakuasi	140	0	100	berhasil	
		Jumlah data dan informasi kesehatan yang dikelola	6	6,00	100	berhasil	
		Jumlah data dan informasi kesehatan yang dikelola	6	6,00	100	berhasil	
		Jumlah aplikasi yang dikelola	4	4,00	100	berhasil	
		Jumlah Penerbitan Izin Rumah	39	42,00	100	berhasil	



		Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota					
		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan	70	70,00	100	berhasil	
		Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	70	84,00	100	berhasil	
		Tersedianya Sistem Rujukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	39	42,00	100	berhasil	
		Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	83,3	90,00	100	berhasil	
		Presentase	90	90,00	100	berhasil	



		Tenaga Kesehatan yang mempunyai Izin					
		Jumlah Tenaga Kesehatan yang mempunyai izin	650	650,00	100	berhasil	
		Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	75	75,00	100	berhasil	
		Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai kebutuhan	55,25	91,08	100	berhasil	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota	4	4,00	100	berhasil	
		Jumlah dokumen perencanaan tenaga	4	4,00	100	berhasil	



		kesehatan					
		Presentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	27	51,83	100	berhasil	
		Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	165	235,00	100	berhasil	
		Jumlah Petugas Laborat Puskesmas yang dibina	34	34,00	100	berhasil	
		Presentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	66	70,00	100	berhasil	
		Presentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin	73	73,00	100	berhasil	
		Jumlah sarana farmasi yang diawasi	156	155,00	99,36	berhasil	
		Junlah dokumen Perizinan	1	1,00	100	berhasil	



		Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					
		Presentase industri rumah tangga yang mempunyai izin	63	92,16	100	berhasil	
		Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	82	70,00	85,37	berhasil	
		Jumlah PIRT yang memiliki SPPRT dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak	33	69,00	100	berhasil	



		Lanjut					
		Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	70	84,72	100	berhasil	
		Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	44	6,00	13,64	gagal	
		Jumlah TPM yang diperiksa	40	188,00	100	berhasil	
		Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	90	37,00	41,11	gagal	
		Jumlah TPM	90	37,00	41,11	gagal	



		yang distikerisasi					
		Jumlah industri rumah tangga yang diperiksa dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	32	51,00	100	berhasil	
		Jumlah PIRT yang diperiksa post market	79	87,00	100	berhasil	
		Jumlah pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan minuman (Sampling dan pengujian pangan industri rumah tangga)	14	36,00	100	berhasil	
		Jumlah dokumen perizinan industri rumah tangga	1	1,00	100	berhasil	
		Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	38	62,00	100	berhasil	
		Jumlah kelompok	53	78,00	100	berhasil	



		Sasaran advokasi dan kemitraan					
		Jumlah advokasi yang dilaksanakan	7	8,00	100	berhasil	
		Jumlah kemitraan yang dilaksanakan	8	8,00	100	berhasil	
		Jumlah Desa/kelurahan yang dibina Desa Siaga	38	62,00	100	berhasil	
		Jumlah kelompok Sasaran promosi	58.000	69.116,00	100	berhasil	
		Jumlah kelompok sasaran promosi	58.000	69.116,00	100	berhasil	
		Jumlah UKBM yang dibina	1006	1.369,00	100	berhasil	
		Jumlah UKBM yang dibina	1006	1.369,00	100	berhasil	
		Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi	60	83,33	100	berhasil	
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Nilai SAKIP	70,20	70,16	100	berhasil	



		Nilai IKM	76,70	82,39	100	berhasil	
		Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	100	100,00	100	berhasil	
		Cakupan Pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	100	103,70	100	berhasil	
		Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	100	100,00	100	berhasil	
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Tahunan yang Disusun Sesuai Pedoman yang Berlaku	100	100,00	100	berhasil	
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan yang Disusun Tepat Waktu	2	2	100	berhasil	



	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Urusan Kesehatan yang disusun	1	1	100	berhasil	
	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	100	100	100	berhasil	
	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	1400	1.655	100	berhasil	
	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	463	344	74,30	berhasil	
	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	berhasil	
	Jumlah kegiatan penatausahaan BMD SKPD	1	1	100	berhasil	
	Persentase ASN Yang meningkat kapasitasnya	100	67	66,70	berhasil	
	Jumlah pengadaan	120	0	0	gagal	



		pakaian dan atribut					
		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	12	8	66,70	berhasil	
		Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100	240	100	berhasil	
		Jumlah persediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	15	15	100	berhasil	
		Jumlah persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6	6	100	berhasil	
		Jumlah persediaan Peralatan rumah tangga	40	40	100	berhasil	
		Jumlah persediaan Bahan logistik kantor	7	7	100	berhasil	
		Jumlah jenis barang cetakan dan	11	11	100	berhasil	



		penggandaan					
		Jumlah jenis bahan bacaan dan koran	2	2	100	berhasil	
		Jumlah persediaan ATK	60	60	100	berhasil	
		Jumlah perjalanan dinas keluar dan dalam daerah	450	1.278	100	berhasil	
		Persentase barang milik daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	100	100	100	berhasil	
		Jumlah jenis pengadaan mebeler	2	2	100	berhasil	
		Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung kantor yang diadakan	7	7	100	berhasil	
		Persentase jasa penunjang yang tersedia sesuai kebutuhan	100	100	100	berhasil	
		Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia setiap bulan	750	650	86,67	berhasil	
		Jumlah rekening	100	100	100	berhasil	



	langganan komunikasi, langganan air dan langganan listrik					
	Jumlah tenaga non PNS yang dibayar	9.936	10.128	100	berhasil	
	Jumlah tenaga non PNS yang dibayar	252	344	100	berhasil	
	Jumlah tenaga non PNS yang dibayar	840	773	92,02	berhasil	
	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	100	100	berhasil	
	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	4	4	100	berhasil	
	Jumlah Pemeliharaan /rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya yang terlaksana	5	5	100	berhasil	
	Persentase pekerjaan BLUD puskesmas yang terlaksana	100	100	100	berhasil	
	Jumlah pekerjaan BLUD	40	40	100	berhasil	



		Puskesmas yang dilaksanakan					
		Jumlah pekerjaan BLUD RSUD KI Ageng Selo yang dilaksanakan	58	58	100	berhasil	
		Jumlah pekerjaan BLUD RSUD KI Ageng Getas Pendowo yang dilaksanakan	45	47	100	berhasil	
		Jumlah pekerjaan BLUD RSUD dr R Soedjati yang dilaksanakan	44	49	100	berhasil	

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel 3.6 di atas, diketahui bahwa indikator kinerja sesuai RPJMD Kabupaten Grobogan yang ditetapkan sebanyak 166 indikator. Adapun yang berhasil diselesaikan sesuai target sebanyak 128 indikator (77,10%). Rata - rata capaian indikator Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan sebesar 88,67%. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	100%				menunjang
	Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	51%				menunjang
		Angka Kematian Bayi	108%				menunjang
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	40%				menunjang
	Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan rujukan	Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi	139%	Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk	103%	menunjang
					Presentase capaian hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	94%	menunjang
					Prevalensi wasting	106	menunjang



					(kurus dan sangat kurus) pada balita	%	ng
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan UKP dan UKM yang tersedia	114 %	menunja ng
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	Tidak menunja ng
				Pengembangan Rumah Sakit (RSUD dr R Soedjati)	Jumlah pengembangan rumah sakit	100 %	menunja ng
				Pengembangan Rumah Sakit (RSUD KI Ageng Selo)	Jumlah pengembangan rumah sakit	67%	menunja ng
				Pengembangan Rumah Sakit (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	Jumlah pengembangan rumah sakit	150 %	menunja ng
				Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pengembangan	250 %	Menunja ng
				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lain yang dilakukan pengembangan	0	Tidak menunja ng



				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasyankes yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	100 %	menunjang
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	0%	Tidak menunjang
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	150 %	menunjang
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD dr R Soedjati)	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	0%	Tidak menunjang
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Ki Ageng Selo)	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Selo)	0%	Tidak menunjang
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik	0%	Tidak menunjang



				Pelayanan Kesehatan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	pelayanan kesehatan		
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi	0	Tidak menunjang
				Pengadaan Obat, Vaksin (Dinkes)	Jenis obat yang disediakan	131 %	menunjang
				Pengadaan Obat, Vaksin (RSUD Ki Ageng Selo)	Jenis obat yang disediakan (RSUD Ki Ageng Selo)	0%	Tidak menunjang
				Pengadaan Obat, Vaksin (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	Jenis obat yang disediakan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	0%	Tidak menunjang
				Pengadaan Bahan Habis Pakai (Dinkes)	Jenis bahan habis pakai yang disediakan	104 %	menunjang
				Pengadaan Bahan Habis Pakai (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	Jenis bahan habis pakai yang disediakan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	0%	Tidak menunjang
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas	Jumlah distribusi obat, vaksin dan BMHP ke puskesmas	0%	Tidak menunjang



				serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)			
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Presentase jenis layanan kesehatan UKM dan UKP yang diberikan	89%	menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	84%	menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	88%	menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	88%	menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita (12 - 59 bulan) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai	90%	menunjang



					standar		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	96%	menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15 - 59 tahun di Kabupaten yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	86%	menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	97%	menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu setahun	63%	menunjang



				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus \geq 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu setahun	118 %	menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jml ODGJ berat di dlm wilayah kerja Kab yg mendapatkan yankes jiwa sesuai standar	124 %	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	127 %	menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	127 %	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah kejadian KLB yang ditangani	13%	menunjang



				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pasca bencana	120 %	menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah bayi dan balita yang ditimbang	75%	menunjang
					Jumlah ibu nifas yang didampingi IMD (Inisiasi Menyusu Dini)	90%	menunjang
					Jumlah bayi umur 6 bl dapat ASI Eksklusif	70%	menunjang
					Jumlah pasar yang diawasi dalam penggunaan garam beryodium	100 %	menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan kesehatan Olahraga	100 %	menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa STBM di Wilayah Kab. Grobogan	139 %	menunjang



					Jumlah Puskesmas dan RS yang melakukan pengelolaan limbah Fasyankes	13%	menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah media promosi kesehatan yang digunakan	120%	menunjang
					Jumlah keluarga yang mendapatkan edukasi keluarga sehat	75%	menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang dibina dalam pelayanan tradisional	90%	menunjang
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah bayi dan balita yang diimunisasi	70%	menunjang
					Jumlah anak sekolah yang diimunisasi	100%	menunjang
					Jumlah Pelacakan Epidelmiologis KLB PD3I, Penyakit Menular dan Keracunan Makanan	100%	menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa	139%	menunjang



				Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	(ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	128 %	menunjang
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Calon Jamaah Haji yang mendapatkan Pembinaan Kesehatan	97%	menunjang
					Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan kesehatan	2%	Tidak menunjang
				Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pasca krisis kesehatan	120 %	menunjang
					Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada Pasien Covid-19	120 %	menunjang
				Pelayanan Kesehatan Penyakit	Jumlah penderita penyakit malaria yang dilayani	153 %	menunjang



				Menular dan Tidak Menular			
					Jumlah penderita penyakit leptospirosis yang dilayani	31%	menunjang
					Jumlah penderita penyakit Filariasis yang dilayani	225 %	menunjang
					Jumlah penderita covid 19	12%	menunjang
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	139 %	menunjang
				Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Deteksi dini penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan Sekolah	0%	Tidak menunjang
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah pengiriman specimen Penyakit Potensial KLB ke laboratorium rujukan atau laboratorium nasional	56%	menunjang
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah kecamatan yang dibina kab sehat	146 %	menunjang
				Penyediaan	Jumlah fasilitas	105	menunjang



				Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	pelayanan kesehatan yang melakukan Telemedicine	%	ng
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah pekerjaan preventif dan promotif yang dilaksanakan	100 %	menunjang
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten /Kota	Jumlah puskesmas terakreditasi Utama	125 %	menunjang
					Jumlah rumah sakit umum daerah tipe D Terakreditasi	100 %	menunjang
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang tertangani	45%	menunjang
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Menurunnya Kasus DBD	87%	menunjang
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat	Jumlah kasus kegawatdaruratan medis yang ditangani	131 %	menunjang



				Terpadu (SPGDT)			
					Jumlah kasus Covid-19 yang dievakuasi	0%	menunjang
				Penyelenggaran Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah data dan informasi kesehatan yang dikelola	100%	menunjang
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah data dan informasi kesehatan yang dikelola	100%	menunjang
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah aplikasi yang dikelola	100%	menunjang
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	108%	menunjang
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan	100%	menunjang



				Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan	120 %	menunjang
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Tersedianya Sistem Rujukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	108 %	menunjang
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	108 %	menunjang
					Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai kebutuhan	100 %	menunjang
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota	Presentase Tenaga Kesehatan yang mempunyai Izin	100 %	menunjang



				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mempunyai izin	100 %	menunjang
				Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100 %	menunjang
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	menunjang
				Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kesehatan	0%	Tidak menunjang
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	Presentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	192 %	menunjang



				Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	142 %	menunjang
					Jumlah Petugas Laborat Puskesmas yang dibina	100 %	menunjang
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	106 %	menunjang
					Presentase industri rumah tangga yang mempunyai izin	146 %	menunjang
					Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat	121 %	menunjang



					Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)		
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Presentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin	100 %	menunja ng
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana farmasi yang diawasi	99%	menunja ng
				Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat,	Jumlah dokumen Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 %	menunja ng



			Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	85%	menunjang
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-	Jumlah PIRT yang memiliki SPPRT dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Tindak Lanjut	0	Tidak menunjang



				IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	14%	Tidak menunjang
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Jumlah TPM yang diperiksa	470 %	menunjang



				antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restora n dan Depot Air Minum (DAM)			
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	41%	Tidak menunja ng
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah TPM yang distikerisasi	41%	Tidak menunja ng
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk	Jumlah industri rumah tangga yang diperiksa dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan	159 %	menunja ng



				Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Minuman Industri Rumah Tangga		
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah PIRT yang diperiksa post market	110 %	menunja ng
					Jumlah pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan minuman (Sampling dan pengujian pangan industri rumah tangga)	257 %	menunja ng
				Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen perizinan industri rumah tangga	100 %	menunja ng
				Program Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	163 %	menunja ng



				Bidang Kesehatan			
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah kelompok sasaran advokasi dan kemitraan	147 %	menunjang
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah advokasi yang dilaksanakan	114 %	menunjang
					Jumlah kemitraan yang dilaksanakan	100 %	menunjang
					Jumlah Desa/ kelurahan yang dibina Desa Siaga	163 %	menunjang
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah kelompok sasaran promosi	119 %	menunjang
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	Jumlah kelompok sasaran promosi	119 %	menunjang



				Bersih dan Sehat			
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah UKBM yang dibina	136 %	menunjang
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM yang dibina	136 %	menunjang
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai SAKIP	100%				menunjang
		Nilai IKM	107%				menunjang



	Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP	100%				menunjang
		Nilai IKM	107%				menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	100%	menunjang
					Cakupan Pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	104%	menunjang
					Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	100%	menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	100%	menunjang



				Daerah	Evaluasi Tahunan yang Disusun Sesuai Pedoman yang Berlaku		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Urusan Kesehatan yang disusun	100 %	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	100 %	menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinkes)	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	118 %	menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD R Soedjati)	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	74%	menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100 %	menunjang
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan penatausahaan BMD SKPD	100 %	menunjang



				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya	67%	menunjang
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dan atribut	0%	Tidak menunjang
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	67%	menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	240%	menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah persediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	menunjang
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah persediaan Peralatan rumah tangga	100%	menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah persediaan Bahan logistik kantor	100%	menunjang



				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinkes)	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	100 %	menunja ng
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Dinkes)	Jumlah jenis bahan bacaan dan koran	100 %	menunja ng
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah persediaan ATK	100 %	menunja ng
				Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinkes)	Jumlah perjalanan dinas keluar dan dalam daerah	284 %	menunja ng
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	100 %	menunja ng
				Pengadaan Mebel	Jumlah jenis pengadaan mebel	100 %	menunja ng
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung kantor yang diadakan	100 %	menunja ng
				Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase jasa penunjang yang	100	menunja ng



				Urusan Pemerintahan Daerah	tersedia sesuai kebutuhan	%	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinkes)	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia setiap bulan	100 %	menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinkes)	Jumlah rekening langganan komunikasi, langganan air dan langganan listrik	100 %	menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinkes)	Jumlah tenaga non PNS yang dibayar	100 %	menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSKAS)	Jumlah tenaga non PNS yang dibayar	92%	menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	100 %	menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya yang terlaksana	100 %	menunjang



				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terlaksana	100 %	menunja ng
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pekerjaan BLUD puskesmas yang terlaksana	100 %	menunja ng
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Dinkes)	Jumlah pekerjaan BLUD Puskesmas yang dilaksanakan	100 %	menunja ng
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD KI Ageng Selo)	Jumlah pekerjaan BLUD RSUD KI Ageng Selo yang dilaksanakan	100 %	menunja ng
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD KI Ageng Getas Pendowo)	Jumlah pekerjaan BLUD RSUD KI Ageng Getas Pendowo yang dilaksanakan	104 %	menunja ng
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD dr R Soedjati)	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD dr R Soedjati)	111 %	menunja ng

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel 3.7 diatas tentang analisis keberhasilan dan kegagalan program

1. Analisis capaian kinerja tujuan ke-1 sasaran ke-1



Tujuan ke-1 Dinas Kesehatan adalah “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran ke-1 “Meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita”

a. Penyebab Keberhasilan

Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan mempunyai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, adapun program yang mempengaruhi keberhasilan dari sasaran ke-1 adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Hambatan

Terdapat penyakit penyerta yang dikarenakan karena kurangnya pengetahuan, kesadaran tentang kesehatan.

c. Solusi Alternatif

Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan bidang pengendalian penyakit untuk mengambil langkah-langkah strategis yang berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan terutama Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita.

2. Analisis Capaian Kinerja Tujuan ke-1 dan sasaran ke-2

Tujuan ke-1 “Meningkatkan Derajat Kesehatan” Sasaran ke-2 “Meningkatkan Kualitas Fasilitas Kesehatan Rujukan”

a. Penyebab Keberhasilan

Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan mempunyai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, adapun program yang mempengaruhi keberhasilan dari sasaran ke-2 untuk meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan rujukan



adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan pembangunan fasilitas kesehatan, pengembangan Rumah Sakit, Pengembangan Puskesmas, Pengembangan Fasilitas Kesehatan lainnya, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan, Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan.

Sudah semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) di Indonesia terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional

b. Hambatan

Sistem Rujukan yang menggunakan Aplikasi SISRUTE (Sistem Rujukan Terintegrasi), belum semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menggunakan aplikasi tersebut. Ketidakjelasan hubungan dengan BPJS Kesehatan dalam pengaturan sistem rujukan.

c. Solusi Alternatif

Diperlukan kerjasama yang terstruktur antara FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan) layanan Jaminan Kesehatan dengan tenaga kesehatan untuk meningkatkan layanan yang berkualitas, serta perbaikan dalam implementasi sistem rujukan tidak hanya bersifat teknis tetapi juga memerlukan kerjasama lintas sector dan disiplin ilmu. Peran Pemerintah , layanan Jaminan Kesehatan , Fasilitas Kesehatan , serta pihak-pihak terkait harus terkoordinasi dengan baik untuk memastikan keberhasilan dan optimalisasi sistem rujukan

3. Analisis Capaian Kinerja Tujuan ke-2 sasaran ke-1

Analisis Capaian Kinerja Tujuan Ke-2 “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas” dan sasaran Ke-2 “Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas”



a. Penyebab Keberhasilan

Adanya komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen Aparatur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan Lembaga social kemasyarakatan yang lain sebagai bahan integral dari pembaharuan sistem pemerintahan.

b. Hambatan

Belum memadainya manajemen data, sehingga data yang di sajikan masih belum konsisten secara berjenjang dari tingkat dasar sampai Kabupaten

c. Solusi Alternatif

Sangat diharapkan peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan dalam pembinaanya, sehingga permasalahan yang ditemukan segera mendapat solusi penyelesaian khususnya di bidang kesehatan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	DINAS KESEHATAN	589.254.152.132	492.000.059.475	83,50
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	589.254.152.132	492.000.059.475	83,50
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	589.254.152.132	492.000.059.475	83,50



4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	420.520.089.538	337.278.100.041	80,20
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	222.890.300	222.703.850	99,92
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	192.890.300	192.703.950	99,90
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	29.999.900	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	147.134.867.000	118.660.726.852	80,65
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	147.134.867.000	118.660.726.852	80,65
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.022.500	25.500.000	72,81
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000	44.790.000	99,53
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	270.103.350	264.065.380	97,76
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65.000.000	64.900.000	99,85
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	705.679.700	678.316.000	96,12



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	113.000.000	107.995.000	95,57
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	8.050.000	63,89
Penyediaan Bahan / Material	100.000.000	99.605.000	99,61
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.117.825.500	1.091.626.369	97,66
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	907.385.000	829.591.947	91,43
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000	6.500.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	543.848.197	90,64
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.885.000	279.243.750	92,81
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	609.372.000	608.547.457	99,86
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	99.910.000	99,91
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	99.865.500	99,87
Pemeliharaan/Rehabilitasi	409.372.000	408.771.957	99,85



Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Peningkatan Pelayanan BLUD	269.181.344.188	214.571.682.186	79,71
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	269.181.344.188	214.571.682.186	79,71
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	164.166.862.608	150.209.744.615	91,50
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	94.418.939.682	85.740.666.619	90,81
Pengembangan Rumah Sakit	17.502.147.000	14.819.634.676	84,67
Pengembangan Puskesmas	1.567.199.160	1.557.507.050	99,38
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.873.514.100	3.850.975.900	99,42
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	58.854.735.350	53.736.095.341	91,30
Pengadaan Obat, Vaksin	4.225.599.873	3.715.464.389	87,93
Pengadaan Bahan Habis Pakai	8.343.854.199	8.025.941.763	96,19



Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	51.890.000	35.047.500	67,54
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.747.922.926	64.469.077.996	92,43
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	200.404.000	182.534.050	91,08
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	127.741.000	61.624.100	48,24
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	397.517.000	236.988.400	59,62
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	36.032.000	35.936.600	99,74
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	500.000.000	207.707.200	41,54
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	595.785.000	590.422.000	99,10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	44.368.000	30.270.000	68,22
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	70.171.000	56.141.000	80,01
Pengelolaan Pelayanan	114.572.000	112.372.000	98,08



Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	199.000.000	187.884.500	94,41
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	357.000.000	333.124.600	93,31
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	34.685.000	30.044.250	86,62
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.745.078.800	2.729.621.250	99,44
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	230.655.000	217.400.000	94,25
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	263.308.500	259.593.750	98,59
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8.537.060.000	6.064.350.000	71,04
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.000.000	12.275.000	87,68
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	151.790.000	132.847.000	87,52
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36.185.146.626	36.183.001.626	99,99
Operasional Pelayanan Puskesmas	17.748.547.000	15.891.207.650	89,54



Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan diKabupaten/Kota	496.918.000	391.193.600	78,72
Investigasi Awal Kegiatan Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	40.665.000	0	0,00
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	657.479.000	522.539.420	79,48
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	0	0	0,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	0	0,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	555.777.386	546.568.500	98,34
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	555.777.386	546.568.500	98,34
Pengembangan Mutudan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	555.777.386	546.568.500	98,34



PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	333.183.500	304.361.450	91,35
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	137.510.000	118.279.200	86,01
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	137.510.000	118.279.200	86,01
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air	45.741.500	40.921.250	89,46



Minum (DAM)			
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan / Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	45.741.500	40.921.250	89,46
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	149.932.000	145.161.000	96,82
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	149.932.000	145.161.000	96,82
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.678.239.100	3.661.284.869	99,54
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	3.163.000.000	3.146.847.969	99,49



	Daerah Kabupaten/Kota			
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.163.000.000	3.146.847.969	99,49
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	428.655.100	427.852.900	99,81
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	428.655.100	427.852.900	99,81
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	86.584.000	86.584.000	100,00
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	86.584.000	86.584.000	100,00

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	74,92	75,02	100	0	0	0	Efisien
2	Meningkatkan Kesehatan ibu, bayi, dan balita				0	0	0	Efisien
	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230,29	117,51	66	0	0	0	Efisien
	Angka Kematian Bayi	13,03	14,1	97	0	0	0	Efisien
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14,5	5,86	99	0	0		Efisien
3	Meningkatkan Kualitas Rujukan	60	65	108	0	0	0	Efisien
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang berkualitas				0	0	0	Efisien
	Nilai SAKIP	70,2	70,6	100	0	0	0	Efisien
	Nilai IKM	76,7	82,39	107	0	0	0	Efisien
5	Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik				0	0	0	Efisien



	didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik							
	Nilai SAKIP	70,2	70,16	100	0	0	0	Efisien
	Nilai IKM	76,7	82,39	107	0	0	0	Efisien

Note:

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 0, maka **tidak efisien**

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan , maka **efisien**

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel 3.9 diatas Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan semua efisien.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100	100	100	420.520.089.538	337.278.100.041	80,20	efisien



	DAERAH KABUPATEN /KOTA							
2	Perencanaan, penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	222.890.300	222.703.850	99,92	efisien
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	147.134.867.000	118.660.726.852	80,65	efisien
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	0	0	0	efisien
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	66,70	66,70	35.022.500	25.500.000	72,81	efisien
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	240	100	2.429.208.550	2.359.347.749	97,12	efisien
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	200.345.000	0	0	efisien
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100	100	100	907.385.000	829.591.947	91,43	efisien



	Pemerintah Daerah							
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	609.372.000	608.547.457	99,86	efisien
11	Peningkatan Pelayanan BLUD	100	100	100	269.181.344.188	214.571.682.186	79,71	efisien
12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,087	1,07	100	164.166.862.608	150.209.744.615	91,50	efisien
13	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dan Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	74	84	100	94.418.939.682	85.740.666.619	90,81	efisien
14	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	74	65,71	88,80	69.747.922.926	64.469.077.996	92,43	efisien



	Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							
15	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	6	6	100	0	0	0	efisien
16	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	39	42	100	85.392.060	0	0	efisien
17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	83,3	90	100	555.777.386	546.568.500	98,34	efisien
18	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten/ Kota	90	90	100	0	0	0	efisien
19	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan	4	4	100	0	0	0	efisien



	n Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/ Kota							
20	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/ Kota	73	73	100	555.777.386	546.568.500	98,34	efisien
21	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	66	70	100	333.183.500	304.361.450	91,35	efisien
22	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	73	73	100	0	0	0	efisien
23	Penerbitan Sertifikat	82	70	85,37	137.510.000	118.279.200	86,01	efisien



	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
24	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, Rumah Makan / Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	44	6	13,64	45.741.500	40.921.250	89,46	efisien
25	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan	90	37	41,11	0	0	0	efisien



	Jajananan							
26	Penerbitan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	32	51	100	149.932.000	145.161.000	96,82	efisien
27	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	38	62	100	3.678.239.100	3.661.284.869	99,54	efisien
28	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	53	78	100	3.163.000.000	3.146.847.969	99,49	efisien
29	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif dan Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /	58.000	69.116	100	428.655.100	427.852.900	99,81	efisien



	Kota							
30	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	1.006	1.369	100	88.548.000	86.584.000	100	efisien

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat efisiensi sumber daya dalam pencapaian sasaran yang diperlukan dalam pelaksanaan pencapaian target-target di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan yaitu 16,50%. Adapun realisasi total anggaran tahun 2023, dari anggaran sebesar Rp.589.254.152.132,- digunakan sebesar Rp.492.000.059.475,- (83,50%). Artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 97.254.092.657,-



BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak 2 tujuan, 3 sasaran dengan 166 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori berhasil)
- Sasaran 1 terdiri dari 122 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori berhasil)
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 139% (kategori berhasil)
- Tujuan 2 terdiri dari 43 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori berhasil)
- Sasaran 1 terdiri dari 43 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori berhasil)



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 589.254.152.132,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 492.000.059.475,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 83,50% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 16,50%

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Grobogan.

Kabupaten Grobogan, 5 Februari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN



dr. SLAMET WIDODO, MAP

NIP. 19640627 198910 1 001

Pembina Utama Muda



LAMPIRAN



SK TIM SAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Gajah Mada No.19 Telp. (0292) 421049 Fax. (0292) 424852
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 000.8.6.3/2512.c /VI/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;
- b. berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tentang pembentukan Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN.**



- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam data lampiran .
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud adalah:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, LKjIP OPD, Cascading Kinerja, Rencana Aksi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.
 2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, LKjIP OPD, Cascading Kinerja, dan Rencana Aksi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.
 3. Menyusun dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, LKjIP OPD, Cascading Kinerja, Rencana Aksi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 4. Menyampaikan dokumen SAKIP tersebut pada kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grobogan
Pada tanggal 03 Juni 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN



dr. SLAMET WIDODO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640627 198910 1 001



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 000.8.6.3/2512.c /VI/2024
TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
GROBOGAN

1. Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja * : Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan : Kesehatan
3. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
4. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan;
 - c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesehatan;
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan di bidang kesehatan;
 - e. Pengelolaan kesekretariatan Dinas;
 - f. Pengelolaan UPTD;
 - g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN



dr. SLAMET WIDODO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640627 198910 1 001



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
GROBOGAN
NOMOR 000.8.6.3/2512.c /VI/2024
TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. Slamet Widodo,M.A.P	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	dr. Mei Hartuti,M.A.P.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Ketua
3.	Ali Solikin, S.Kep,Ners., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum	Sekretaris
4.	dr. Djatmiko, M.A.P.	Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Anggota
5.	dr. Agus Budi Sarjono, M.M.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Penunjang	Anggota
6.	dr. Wahyu Tri Haryadi, M.M.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Pujiyono,SKM., M.Kes	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
8.	Tri Wahjoe Astoeti, S.Si., M.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
9.	Titik Haryanti,S.K.M., S.Tr.Keb., Bdn	Administrator Kesehatan Ahli Madya	Anggota
10.	Wiwik Puji Astuti, S.K.M., M.M	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	Anggota
11.	Rumia Magdalena, S.KM., M.A.P.	Analisis Gizi	Anggota
12.	Jati Yuswaningsih, S.Kep., Ns., M.Kes.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
13.	Neneng Suryani, S.KM., M.M.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
14.	Moetsrihono Soesilo Heri Tetoeko, SKM, M.Kes.	Administrator Kesehatan Ahli Madya	Anggota
15.	Gunawan Cahyo Utomo, SST., MPH	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Anggota
16.	Subandi, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	Anggota
17.	Sri Purwanti	Pengelola Program Imunisasi	Anggota
18.	Sri Pujiatun, S.Kp.G,	Administrator Kesehatan	Anggota



	M.Kes.	Ahli Madya	
19	Agus Nuryanto, S.Kom	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN



dr. SLAMET WIDODO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640627 198910 1 001



MATRIKS RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN

LAMPIRAN 6.1 PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN BESERTA PAGU ANGGARAN

Program	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		TAHUN										Unit Kerja Penanggung jawab			
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Jumlah laporan keuangan memenuhi standar SAP / jumlah laporan keuangan x 100 %	%	100	100	100	318.331.616.501	100	296.048.403.346	100	307.890.338.480	100	312.354.748.402	100	316.037.411.898	100	1.550.662.520.627		
	Cakupan Pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	Rata2 capaian kinerja kegiatan administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan BMD	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	Jumlah dokumen penilaian manajemen risiko meliputi dokumen MR strategis & operasional OPD yang disusun / jumlah dokumen yang seharusnya disusun x 100 %	%	NA	100	100		100		100		100		100		100			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Tahunan yang Disusun Sesuai Pedoman yang Berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi tahunan yang disusun sesuai Pedoman dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi tahunan yang harus disusun dikali 100%	%	100	100	100	101.227.500	100	101.227.500	100	101.227.500	100	101.227.500	100	101.227.500	100	506.137.500		
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan yang Disusun Tepat Waktu		buah	2	2	2	70.000.000	2	70.000.000							4	140.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen						4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	12	210.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Urusan Kesehatan yang disusun		buah	1	1	1	31.227.500	1	31.227.500							2	62.455.000		



	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan						1	31.227.500	1	31.227.500	1	31.227.500	3	93.682.500		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan / Jumlah semua ASN x 100%	%	100	100	100	117.713.144.000	100	103.713.144.000	100	116.345.144.000	100	120.345.144.000	100	578.461.720.000		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dirkes)	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan		orang	1.161	1.180	1.400	92.959.796.000	1.400	82.959.796.000					2.800	175.919.592.000		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							1.495	90.959.796.000	1.995	92.959.796.000	2.495	92.959.796.000	5985	276.879.388.000		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD R Soedpati)	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan		orang	367	367	453	24.753.348.000	463	20.753.348.000					916	70.260.044.000		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							357	22.753.348.000	367	24.753.348.000	377	24.753.348.000	1101	72.260.044.000		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD Ki Ageng Sebo)																	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							91	922.000.000	115	922.000.000	125	922.000.000	331	2.766.000.000		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)																	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							133	1.710.000.000	163	1.710.000.000	193	1.710.000.000	489	5.130.000.000		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi barang milik daerah yang terpenuhi / jumlah kebutuhan administrasi barang milik daerah dalam satu tahun x 100%	%	100	100		100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	40.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan penatausahaan BMD SKPD		kegiatan	NA	NA	0	1	10.000.000						1	10.000.000		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan						2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		30.000.000		



Administrasi Kepagawain Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti kapasitasnya	jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan / jumlah ASN yang direncanakan mengikuti pendidikan dan pelatihan x 100%	%	100	100	100	100.000.000	100	136.720.000	100	100.000.000	100	136.720.000	100	150.000.000	100	623.440.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dan atribut		buah	NA	NA			120	36.720.000							120	36.720.000
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket								1	36.720.000	1			2	36.720.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi		orang	0	16	12	100.000.000	12	100.000.000							24	200.000.000
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		orang						12	100.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000		36	350.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi / Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam satu tahun x 100%	%	100	100	100	1.768.400.000	100	1.488.400.000	100	1.488.400.000	100	1.688.400.000	100	1.788.400.000	100	8.222.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah persediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		jenis	18	18	15	40.000.000	15	40.000.000							15	80.000.000
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket						1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		3	120.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah persediaan peralatan dan perlengkapan kantor		jenis	6	6			6	20.000.000							6	20.000.000
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket						1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		3	60.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah persediaan Peralatan rumah tangga		jenis	40	40	40	40.000.000	40	40.000.000							40	80.000.000



	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket							1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah persediaan Bahan logistik kantor	Jenis	7	7	7	600.000.000	7	500.000.000							7	1.100.000.000	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket							4	500.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	12	1.700.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinkes)	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis	4	53	10	80.000.000	11	80.000.000							11	160.000.000	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket							1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	3	240.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinkes)	Jumlah jenis bahan bacaan dan koran	Jenis	3	6	2	8.400.000	2	8.400.000							2	16.800.000	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen							1	8.400.000	1	8.400.000	1	8.400.000	3	25.200.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah persediaan ATK	Jenis	59	59	60	100.000.000	60	100.000.000							60	200.000.000	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket							1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinkes)	Jumlah perjalanan dinas keluar dan dalam daerah	Kali	300	350	400	900.000.000	450	700.000.000							850	1.600.000.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan							1.800	700.000.000	1.800	800.000.000	1.800	900.000.000	5.400	2.400.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah / Jumlah jenis kebutuhan Barang Milik Daerah dalam 1 tahun x 100%	%	100	100	100	250.345.000	100	200.345.000	100	225.345.000	100	225.345.000	100	275.345.000	100	11.176.725.000
Pengadaan Mebel	Jumlah jenis pengadaan mebel	Jenis	NA	NA	NA		2	50.000.000							2	50.000.000	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit							3	50.000.000	3	50.000.000	3	100.000.000	9	200.000.000	



Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung kantor yang diadakan		jenis	14	12	5	250.345.000	7	150.345.000					7	400.690.000	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit						3	175.345.000	3	175.345.000	3	175.345.000	9	526.035.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia sesuai kebutuhan	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi / Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun X 100%	%	100	100	100	10.133.913.000	100	8.633.913.000	100	6.001.913.000	100	6.001.913.000	100	36.773.565.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinkes)	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia setiap bulan		buah	540	1.341	700	6.273.000	750	6.273.000					1.450	12.546.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan						12	6.273.000	12	6.273.000	12	6.273.000	36	18.819.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinkes)	Jumlah rekening langganan komunikasi, langganan air dan langganan listrik		rekening	132	192	144	485.000.000	144	485.000.000	144				288	970.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan						4	485.000.000	4	485.000.000	4	485.000.000	12	1.455.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinkes)	Jumlah tenaga non PNS yang dibayar		orang	800	9.912	9.936	6.510.640.000	9.936	5.510.640.000					19.872	12.021.280.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan						1	5.510.640.000	1	5.510.640.000	1	5.510.640.000	3	16.531.920.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSKAS)	Jumlah tenaga non PNS yang dibayar		orang	NA	1.392	252,00	1.122.000.000	252	922.000.000					504	2.044.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSKAGP)	Jumlah tenaga non PNS yang dibayar		orang	NA	1.428	840	2.010.000.000	840	1.710.000.000					1.680	3.720.000.000	



	Jumlah BLUD Dinkes yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		unit kerja							31	70.274.587.001	31	70.502.276.923	31	72.894.387.001	31	213.671.450.925
	Persentase pekerjaan BLUD RSUD KI Ageng Selo yang terlaksana	Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan / jumlah pekerjaan yang direncanakan x 100%	%	100	100	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000							100	
	Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan / Jumlah BLUD x 100%	%							100	5.000.000.000	100	5000000000	100	5000000000	100	15.000.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD KI Ageng Selo)	Jumlah pekerjaan BLUD RSUD KI Ageng Selo yang dilaksanakan		pekerjaan	NA	58	58	5.000.000.000	58	5.000.000.000							58	10.000.000.000
	Jumlah BLUD RSUD KI Ageng Selo yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		unit kerja							1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	15.000.000.000
	Persentase pekerjaan BLUD RSUD KI Ageng Getas Pendowo yang terlaksana	Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan / jumlah pekerjaan yang direncanakan x 100%	%	100	100	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000			100				100	6.000.000.000
	Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan / Jumlah BLUD x 100%	%							100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	9.000.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD KI Ageng Getas Pendowo)	Jumlah pekerjaan BLUD RSUD KI Ageng Getas Pendowo yang dilaksanakan		pekerjaan	NA	35	42	3.000.000.000	45	3.000.000.000							45	6.000.000.000
	Jumlah BLUD RSUD KI Ageng Getas Pendowo yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		unit kerja							1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	9.000.000.000
	Persentase pekerjaan BLUD RSUD dr R Soedjati yang terlaksana	Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan / jumlah pekerjaan yang direncanakan x 100%	%	100	100	100	106.650.000.000	100	103.220.066.845			100		100		100	209.870.066.845
	Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan / Jumlah BLUD x 100%	%							100	105.073.722.979	100	105.073.722.979	100	106.200.795.397	100	316.348.241.355



Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD dr R Soedjati)	Jumlah pekerjaan BLUD RSUD dr R Soedjati yang dilaksanakan	pekerjaan	40	45	45	106.650.000.000	44	103.220.066.845						44	209.870.066.845	
	Jumlah BLUD RSUD dr R Soedjati yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja						1	105.073.722.979	1	105.073.722.979	1	106.200.795.397	1	316.348.241.355	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						105.832.177.749		98.923.925.307	101.880.882.319	103.358.155.112	104.576.747.761				514.571.888.248	
	Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan/jumlah Penduduk di kabupaten x 1.000	per 1.000	0,087	0,083	0,087	0,087	0,09		0,09		0,09		0,09		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan UKP dan UKM yang tersedia	unit	74	74	74	48.281.088.349	74	43.760.000.000	74	45.615.000.000	75	45.208.155.112	75	44.313.747.761	75	227.177.991.222
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit	1	0	1	2.763.054.999	0	-	-	-	-	-	1	2.763.054.999		
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	unit						0	0	0	0	0	0	0		
Pengembangan Rumah Sakit (RSUD dr R Soedjati)	Jumlah pengembangan rumah sakit	paket	NA	2		1	2.000.000.000						1	2.000.000.000		
	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	unit						1	4.000.000.000	1	3.000.000.000	1	4.000.000.000	3	11.000.000.000	



Pengembangan Rumah Sakit (RSUD Ki Ageng Selo)	Jumlah pengembangan rumah sakit		paket	NA	NA	2	5.861.136.592	3	5.000.000.000	0			1		5	10.861.136.592
	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		unit							1	2.000.000.000	1	2.500.000.000	1	3.955.000.000	8.455.000.000
Pengembangan Rumah Sakit (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	Jumlah pengembangan rumah sakit		paket	NA	NA	1	4.209.795.001	2	4.000.000.000						3	8.209.795.001
	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		unit							1	2.500.000.000	1	3.000.000.000	1	4.000.000.000	9.500.000.000
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pengembangan		Puskesmas	4	2	2	1.200.000.000	2	4.000.000.000						4	5.200.000.000
	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		unit							1	5.000.000.000	1	6.973.155.112	1	4.000.000.000	15.973.155.112
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lain yang dilakukan pengembangan		Fasyankes	1	1	1	115.000.000	0							1	115.000.000
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		unit							0		0		0		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasyankes yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan		Fasyankes	1	1			1	20.000.000	1					1	20.000.000



Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo)	paket	NA	NA			0	0				0				
	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit						6	1.000.000.000	6	1.000.000.000	6	2.000.000.000	18	4.000.000.000	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik pelayanan kesehatan	paket	22	27	15	6.754.820.408	10	3.000.000.000						25	24.059.820.408	
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit						150	6.205.000.000	150	3.000.000.000	150	5.100.000.000	450	14.305.000.000	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD dr R Soedjati)	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik pelayanan kesehatan (RSUD dr R Soedjati)	paket	NA	3	1	8.157.000.000	1	4.000.000.000						2	12.157.000.000	
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit						10	4.500.000.000	36	500.000.000	9	3.000.000.000	55	8.000.000.000	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Ki Ageng Solo)	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik pelayanan kesehatan (RSUD Ki Ageng Solo)	paket	NA	NA	2	2.804.600.000	2	1.000.000.000						4	3.804.600.000	
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit						300	2.000.000.000	350	3.750.000.000	400	3.000.000.000	1.050	8.750.000.000	



Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit								455	500.000.000	455	500.000.000	455	500.000.000	1.365	1.500.000.000
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Jumlah distribusi obat, vaksin dan BMHP ke puskesmas	kali	240	300	720	430.262.000	360	320.000.000								1080	750.262.000
Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	paket								1	270.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	3	920.000.000
Presentase capaian hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Jumlah capaian hasil semua indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan / Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan x 100 %	%	69,99	82,93	100		100	100		100		100		100		100	
Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	Jumlah Balita Gizi Kurang / Jumlah balita yang diukur berat badan dan panjang atau tinggi badan x 100%	%	4	6	6		5	5		4		4		4		4	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Berah Kabupaten/Kota	Presentase jenis layanan kesehatan UKM dan UKP yang diberikan / jumlah jenis layanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia x 100	%	64	64	70	57.451.089.400	74	55.098.925.307	78	56.180.882.319	82	58.045.000.000	86	60.138.000.000	86	286.913.897.026	



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	orang	20636	22566	21793	202.971.000	22041	200.000.000							43.834	1.387.971.000
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang						19399	260.000.000	19.298	350.000.000	19.468	375.000.000	58.165	985.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	orang	21321	21233	21386	969.158.300	21317	800.000.000							42.703	4.454.158.300
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang						19825	800.000.000	19732	900.000.000	19918	985.000.000	59.475	2.685.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	orang	21003	21133	21343	91.052.200	21250	90.000.000							42.593	181.052.200
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang						19573	100.000.000	19487	150.000.000	19666	175.000.000	58.736	425.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita (12 - 59 bulan) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	63766	90619	89512	72.609.500	88733	72.609.500							178.245	145.219.000
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang						71216	75.000.000	72151	90.000.000	70906	95.000.000	214.273	260.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	orang	67.315	196.009	199.729	164.929.000	203.380	160.000.000							403.109	324.929.000



	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang							20.740	30.000.000	20.769	35.000.000	20.798	40.000.000	62.307	105.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jml ODGJ berat di dim wilayah kerja Kab yg mendapatkan yankes jiwa sesuai standar	orang	1.234	2.443	2.443	100.001.000	2.455	90.000.000							4.898	190.001.000
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang							3.711	100.000.000	3.716	120.000.000	3.721	125.000.000	11.148	345.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	orang	4.031	12.673	12.117	137.880.000	11.561	130.000.000							23.678	267.880.000
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang							11.006	135.000.000	10.450	140.000.000	9.894	150.000.000	31.350	425.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	orang	21.081	25.022	29.531	322.960.000	33.057	300.000.000							62.588	622.960.000
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang							32.800	350.000.000	34.500	370.000.000	36.500	380.000.000	103.800	1.100.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah kejadian KLB yang ditangani	kali	1026	10	15	250.000.000	15	200.000.000							30	450.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen							4	230.000.000	4	240.000.000	4	250.000.000	12	720.000.000



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa STBM di Wilayah Kab. Grobogan	desa	25	55	85	143.545.000	115	120.000.000						205	263.545.000
	Jumlah Puskesmas dan RS yang melakukan pengelolaan limbah Fasankes	unit	38	38	38		38							38	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen						5	130.000.000	5	135.000.000	5	140.000.000	15	405.000.000
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah media promosi kesehatan yang digunakan	Jenis	3	3			4	74.000.000						4	74.000.000
	jumlah keluarga yang mendapatkan edukasi keluarga sehat	KK	214.193	230.000			250.000							250.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen						33	75.000.000	33	80.000.000	33	90.000.000	99	245.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	jumlah puskesmas yang dibina dalam pelayanan tradisional	unit	30	30			30	25.000.000						30	145.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen						2	30.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	6	120.000.000
Pengelolaan Survelians Kesehatan	jumlah bayi dan balita yang dimunisasi	orang	35.720	34.250	33.950	44.040.750	33.750	40.000.000						168.350	249.040.750
	jumlah anak sekolah yang dimunisasi	orang	60.288	59.750	59.500		59.300							296.150	
	Jumlah Pelacakan Epidemiologis KLB PD3I, Penyakit Menular dan Keracunan Makanan	kasus	1425	333	300		200							950	



	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan								5	20.000.000	5	25.000.000	5	30.000.000	15	75.000.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah penderita penyakit malaria yang dilayani	orang	25	23	20	348.132.000	17	250.000.000							37	598.132.000
	jumlah penderita penyakit leptospirosis yang dilayani	orang	3	7	10		13								23	
	jumlah penderita penyakit Filariasis yang dilayani	orang	19	10	6		4								10	
	Jumlah penderita covid 19	orang	1425	7500	2000		1000								3000	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								22	260.000.000	22	275.000.000	22	280.000.000	66	815.000.000
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	orang	46.540	50.500	51.500	27.121.740.000	53.500	27.200.000.000							105.000	54.321.740.000
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen							1	27.530.882.319	1	27.900.000.000	1	28.900.000.000	3	84.330.882.319
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Kesehatan dan Sekolah	Jumlah Deteksi dini penyalahgunaan Napza di Fasilitas Kesehatan dan Sekolah	unit					45	15.000.000							45	15.000.000
	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang							9.268	20.000.000	9.281	25.000.000	9.294	30.000.000	27.843	75.000.000



Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah pengiriman spesimen Penyakit Potensial KLB ke laboratorium rujukan atau laboratorium nasional	kali	114	231		147	50.000.000					147	50.000.000	
	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket					38	50.000.000	38	55.000.000	38	60.000.000	114	165.000.000
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah kecamatan yang dibina kab sehat	Kec	0	6	10	250.000.000	13	15.000.000				23	265.000.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen					1	20.000.000	1	25.000.000	1	3.000.000	3	48.000.000
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan Telemedicine	unit			39	18.100.000	39	18.100.000					39	36.200.000
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit					17	20.000.000	18	25.000.000	19	30.000.000	19	75.000.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah pekerjaan preventif dan promotif yang dilaksanakan	pekerjaan	13	8	8	25.444.365.000	8	23.849.215.807					8	49.293.580.807
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen					30	24.000.000.000	30	25.000.000.000	30	26.000.000.000	90	75.000.000.000
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas terakreditasi Utama	puskesmas	12	19		24	15.000.000						30	15.000.000



	Jumlah rumah sakit umum daerah tipe D Terakreditasi	unit	0	1		2								2	
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit						56	20.000.000	60	25.000.000	61	30.000.000		75.000.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KPI) yang tertangani	kasus	0	20		20	10.000.000							20	10.000.000
	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan						6	15.000.000	6	20.000.000	6	30.000.000	18	65.000.000
Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Menurunnya Kasus ODB	kasus	511	450	410	431.178.800	380	100.000.000						380	531.178.800
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Dokumen						12	120.000.000	12	125000000	12	130000000	36	375.000.000
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah kasus kegawatdaruratan medis yang ditangani	kasus	271	280	280	82.699.100	280	35.000.000						560	117.699.100
	Jumlah kasus Covid-19 yang dievaluasi	kasus	100	120	130		140							270	
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit						42	40.000.000	42	45.000.000	42	50.000.000	42	135.000.000



Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Unit	11	10	7	39	45.000.000	8	60.000.000	11	75.000.000	10	85.000.000	10	265.000.000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tidak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan	Unit	70	70	70	70	15.000.000							70	15.000.000
	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit						16	20.000.000	20	25.000.000	24	30.000.000	24	75.000.000
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang membenarkan pelayanan kesehatan sesuai standar	unit	70	70	70	70	15.000.000							70	90.000.000
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NIM) Pelayanan kesehatan	Unit						41	20.000.000	41	25.000.000	41	30.000.000	42	75.000.000
Penyusunan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Tersedianya Sistem Rujukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	0	38	39	39	15.000.000							39	15.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen						1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	70.000.000



PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Jumlah puskesmas dengan 9 tenaga strategis / dibagi semua puskesmas x 100 %	%	40	56,6	66,6	368.430.000	83,3	343.569.900	90	357.312.696	93,33	362.493.730	100	366.767.531	100	1.799.573.857
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase Tenaga Kesehatan yang mempunyai izin	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mempunyai izin / Jumlah Tenaga Kesehatan di kabupaten/kota x 100 %	%	75	80	80		90	20.000.000	90	20.000.000	95	20.000.000	95	20.000.000	95	80.000.000
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mempunyai izin		orang	2.656	1.500	1.750		650	10.000.000						2.400	10.000.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Dokumen						1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		orang	0	75	100		75	10.000.000	100	80		80		435	40.000.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Dokumen						1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	
	Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai kebutuhan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ada / Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibutuhkan x 100 %	%	48,10	49,40	53,20	0	55,25		65,15		70,55		80,20		80,20	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		dokumen	NA	4	4	250.000.000	4	208.139.900	4	214.882.696	4	215.063.730	4	215.063.730	4	1.103.150.056



Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kesehatan	dokumen	NA	4	4	250.000.000	4	208.139.900						4	458.139.900		
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen						2	114.882.696	2	115.063.730	2	115.063.730	6	345.010.156		
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang						4585	100.000.000	5165	100.000.000	5826	100.000.000	5826	300.000.000		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (minimal 20 JP/tahun) / Jumlah seluruh tenaga kesehatan x 100 %	%	15,40	15,45	25,25	119.430.000	27	115.430.000	35	122.430.000	57,5	127.430.000	72,5	131.703.801	72,5	616.423.801
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	orang	NA	60	150	119.430.000	165	95.430.000						955	214.860.000		
	Jumlah Petugas Laborat Puskesmas yang dibina	Orang	0	0		34	20.000.000							34	20.000.000		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang						612	122.430.000	817	127.430.000	1.022	131.703.801	1.022	381.563.801		



Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dokumen	0	1	1		1	7.500.000						1	7.500.000	
	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana						200	7.500.000	200	10.000.000	200	10.000.000	200	27.500.000	
	Presentase industri rumah tangga yang mempunyai izin	Jumlah industri rumah tangga yang berizin / jumlah semua industri rumah tangga yang terdaftar x 100 %	%	60	61	62	63	64	65	66	66					
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Sarana	50	80	81	121.390.000	82	85.392.060	83	88.393.822	84	86.098.987	85	87.742.906	415	469.017.775



Pengendalian dan Pengawasan Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Icin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang memiliki SP-IRT dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut		Sarana	30	31	32	121.390.000	33	85.392.060					65	206.782.060		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Icin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Dokumen						1	88.393.822	1	86.098.987	1	87.742.906	3	262.235.715	
Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) / Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang dilaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) x 100 %			%	60	65	70	75	80	85	85						



<p>Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</p>	<p>Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</p>		Buah	34	40	42		44	7.500.000	46	7.500.000	48	7.500.000	50	7.500.000	230	30.000.000
<p>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</p>	<p>Jumlah TPM yang diperiksa</p>		unit	12	20	30		40	7.500.000							70	7.500.000
	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</p>		Dokumen						1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	3	22.500.000	
<p>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</p>	<p>Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</p>		Buah	30	60	90		90	7.500.000	90	7.500.000	90	7.500.000	90	7.500.000	450	30.000.000



	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	unit							24	92.652.000	24	95.652.000	24	96.652.000	72	284.956.000	
Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen perizinan industri rumah tangga	dokumen	0	1	1			1	7.500.000							37.500.000	
	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	dokumen						1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	Jumlah desa siaga aktif mandiri dibagi jumlah desa siaga aktif yang ada x 100%	desa	23	28	33	684.338.500	38	636.434.805	43	661.892.197	48	671.489.634	53	679.406.497	53	3.333.561.633
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kelompok sasaran advokasi dan kemitraan	Unit	32	39	46	332.952.000	53	300952000	60	322.952.000	67	323.549.437	74	327.966.300	74	1.608.371.737	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah advokasi yang dilaksanakan	kali	4	5	6	332.952.000	7	300.952.000							13	633.904.000	
	Jumlah kemitraan yang dilaksanakan	kali	5	6	7		8								15		
	Jumlah Desa/kelurahan yang dibina Desa Siaga	desa	23	28	33		38								71		



	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen							1	322.952.000	1	323.549.437	1	327.966.300	3	974.467.737
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promosi Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok sasaran promosi	unit	12.487	30.000	40.000	265.411.500	58.000	252.765.197	60.000	255.965.197	62.000	264.965.197	65.000	266.465.197	65.000	1.305.572.288
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kelompok sasaran promosi	unit	12.487	30.000	40.000	265.411.500	58.000	252.765.197						58.000	518.176.697	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen							1	255.965.197	1	264.965.197	1	266.465.197	3	787.395.591
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dibina	Unit	948	967	986	85.975.000	1.006	82.717.608	1026	82.975.000	1.047	82.975.000	1068	84.975.000	1.068	419.617.608
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM yang dibina	unit	948	967	986	85.975.000	1.006	82.717.608						1.006	168.692.608	
	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen							1	82.975.000	1	82.975.000	1	84.975.000	3	250.925.000

Program



SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Gajah Mada No. 19 Telp. (0292) 421049 Fax. (0292) 424852
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 800/1126.A/1/2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.
KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari



- keputusan ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grobogan
Pada tanggal 20 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN



ANIMET WIDODO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640627 198910 1 001



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 800/1126.A/1/2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN 2021- 2026

1. Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan : Kesehatan
3. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
4. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan;
 - c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesehatan;
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan di bidang kesehatan;
 - e. Pengelolaan kesekretariatan Dinas;
 - f. Pengelolaan UPTD;
 - g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN



MET WIDODO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640627 198910 1 001



PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : dr. Slamet Widodo, M.A.P
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sri Sumarni, S.H., M.M.
Jabatan : Bupati Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Grobogan, 15 Januari 2024



Pihak Kedua,

Sri Sumarni, S.H., M.M.



Pihak Pertama,

dr. Slamet Widodo, M.A.P
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 196406271989101001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
1.	Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	117,51 (22 kasus)	160,80 (35 kasus)
		Angka Kematian Bayi	14,10 (264 kasus)	12,54 (273 kasus)
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	5,86	14
2.	Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan rujukan	Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi	83,33	65
3.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Sakip	70,16	BB (70,25)
		Nilai IKM	82,39	B (77,70)
4.	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di dukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai Sakip	70,16	BB (70,25)
		Nilai IKM	82,39	B (77,70)



No.	Program	Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	124.929.765.350	128.415.156.400	
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	103.965.693.608	80.625.139.815	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	555.777.386	559.600.000	
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	333.183.500	865.905.785	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.678.239.100	66.500.000	
Jumlah Program		233.462.658.944	210.552.302.000	

Grobogan, 15 Januari 2024

BUPATI GROBOGAN,

ERISUMARNI, S.H., M.M

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GROBOGAN,

dr. Slamet Widada, M.A.P
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 196406271969101001



PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

